

**DAMPAK PROGRAM UP2K (UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN  
KELUARGA) TERHADAP PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN  
MASYRAKAT PENERIMA BANTUAN DITINJAU MENURUT  
EKONOMI ISLAM DIKECAMATAN PANKALAN KURAS  
KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam ( S.EI )**



**DI SUSUN OLEH :**

**RITA SAHYUNI HASIBUAN**

**NIM: 10725000297**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1432 H/2011 M**

## ABSTRAK

**Judul : Dampak Program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Bantuan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

Latar belakang dari penelitian ini adalah, ketimpangan besar dalam distribusi pendapatan yang menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan, mengharuskan pemerintah untuk ambil andil dalam penanggulangan masalah ini. Banyak program yang telah diambil pemerintah salah satunya adalah program UP2K. Untuk mengetahui dampak program UP2K di Kecamatan pangkalan Kuras, maka dilakukanlah penelitian ini.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program UP2K di kecamatan Pangkalan Kuras, Bagaimana kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan sebelum dan sesudah menerima bantuan, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap hal tersebut.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang beralamat JL. Lintas Timur Sorek Satu. Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus PKK selaku penggerak dalam pelaksanaan Program ini dan juga seluruh keluarga yang tergabung dalam kelompok usaha bersama. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dampak program UP2K terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak dari program UP2K ini dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan, dengan melihat kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan program UP2K ini.

Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu melalui observasi, angket dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan sekunder diperoleh dari buku-buku bacaan yang berkenaan serta dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penelitian ini. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kelompok UP2K yang terdapat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 135 orang. Karena banyaknya populasi maka penulis mengambil sampel sebanyak 68 orang atau sama dengan 50% yang ditentukan dengan *purposive sampling*.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudian program UP2K juga memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan meskipun tidak begitu signifikan, kemudian pelaksanaan program UP2K di Kecamatan Pangkalan Kuras sejauh ini telah tepat sasaran, akan tetapi masih ada terdapat penyalahgunaan pada beberapa orang pengurus,. Kemudian mengenai pelaksanaan program UP2K di Kecamatan Pangkalan kuras dan dampak yang diberikan dari pelaksanaan program UP2K ini dibolehkan oleh syari'at Islam, karena sesuai dengan nilai utama Islam mengenai keadilan dalam segala aspek kehidupan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Geografis .....	14
B. Keadaan Penduduk.....	15
1. Penduduk dan Perkembangannya.....	15
2. Struktur Umur Penduduk.....	17
3. Agama dan Kepercayaan.....	18
C. Sumber Penghasilan Utama penduduk .....	19
D. Kondisi Ekonomi kecamatan Pangkalan Kuras .....	20
E. Gambaran Umum Program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan .....	23
<b>BAB III    TELAAH PUSTAKA</b>	
A. Kemiskinan .....	31
a. Pengertian Kemiskinan.....	31
b. Ciri-ciri Penduduk Miskin.....	33
c. Langkah-langkah Mengatasi Kemiskinan .....	37
B. Pendapatan .....	40
a. Pengertian Pendapatan .....	40
b. Penyebab Pendapatan Masyarakat Tidak Merata.....	41
C. Kesejahteraan .....	44
a. Pengertian Kesejahteraan .....	44
b. Pentingnya Pemerataan Kesejahteraan.....	46

D. Ekonomi Kerakyatan.....	49
a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan.....	49
b. Ekonomi Kerakyatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin.....	53
<b>BAB IV DAMPAK PROGRAM UP2K (UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA) TERHADAP PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM</b>	
A. Kondisi Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan.....	58
B. Pelaksanaan UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan keluarga).....	67
C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Dampak Program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga).....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan pedoman kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek , baik dalam sosial, ekonomi, politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 89:



Artinya: “...Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu...” (Q.S 16: 89)<sup>2</sup>

Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi Islam, umat Islam boleh menjadi orang kaya bahkan dianjurkan agar umat Islam itu tidak menjadi orang miskin, akan tetapi tidak dilarang untuk hidup sederhana.<sup>3</sup> Dalam mewujudkan kehidupan ekonomi, sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber daya-Nya di alam raya ini. Allah SWT mempersilahkan

---

<sup>1</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 1.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 377.

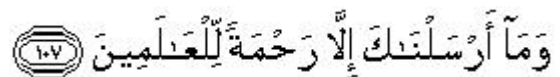
<sup>3</sup>Dr. Akhmad Mujahidin, “*Dasar-dasar Ekonomi Islam*”, (Pekanbaru: Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2007), h. 17.

manusia untuk memanfaatkannya, sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 29:



Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 2: 29)<sup>4</sup>

Tujuan Allah menciptakan, dan mengatur semua ini adalah semata-mata agar umatnya dapat memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera di muka bumi ini, kemudian juga agar manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya baik yang bersifat dharuriah maupun hajiyat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam. Yakni salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hal ini disebutkan secara jelas dalam QS. Al-Anbiya’ ayat 107:



Artinya: “dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta.” (Q.S 21. 107)<sup>5</sup>

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 6

<sup>5</sup>*Ibid.*

dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>6</sup>

Ketimpangan besar dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah masalah utama dalam mencapai kesejahteraan.<sup>7</sup> Masalah ketimpangan ini apabila dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious cycles*), yaitu suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu Negara tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Ketimpangan kesejahteraan tidak hanya terjadi antar Negara-negara maju dan berkembang saja, akan tetapi kenyataannya di Indonesia khususnya masih banyak terdapat masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan (tidak sejahtera). Bukan hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan juga masih banyak terdapat masyarakat yang hidup dalam taraf kemiskinan. Disisi lain, justru banyak terdapat penduduk yang hidupnya sangat sejahtera.

Gap atau ketimpangan kesejahteraan yang terjadi dikarenakan pembangunan ekonomi yang tidak merata, dimana salah satu tolak ukur pembangunan ekonomi adalah pendapatan nasional atau pendapatan perkapita penduduknya. Bagaimana pembangunan ekonomi dapat merata jika pendapatan perkapita penduduknya tidak merata.

---

<sup>6</sup>Prof. Dr. Hj. Sutyastie Soemitro Remi dan Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2002), hal.27

<sup>7</sup>Dr. Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian di Indonesia (Beberapa Masalah Penting)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 84

Untuk mengatasi segala masalah kemiskinan yang ada di Indonesia, pemerintah pusat menciptakan program-program untuk penanggulangan kemiskinan dengan merumuskan bentuk program pemberdayaan yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

Dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, pemerintah pusat menggalakkan program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan dukungan anggaran pada APBN maupun APBD agar masyarakat miskin cukup diberdayakan dengan berbagai program-program pemberdayaan seperti program pembinaan dan peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K), program pembangunan kecamatan, program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), dan juga termasuk program upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), dan seterusnya.<sup>8</sup>

Program UP2K adalah salah satu bentuk program yang diambil pemerintah yang ditujukan kepada kaum perempuan dan hanya diprioritaskan kepada mereka yang kurang mampu atau minim modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sehingga mereka tidak mampu untuk meningkatkan pendapatan mereka. Atau lebih jelasnya pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa adanya penambahan modal dari pendapatan mereka.

Hal tersebut dilakukan pemerintah karena mengingat kondisi kaum perempuan saat ini, dimana tingkat pendidikan dan tingkat keterampilan yang

---

<sup>8</sup> WWW. Bappeda Pekanbaru, Akses Hari Senin Tanggal 12 Desember 2010 Pukul 13.00.



rendah, serta tingkat produktivitas yang rendah pula sehingga mengakibatkan tidak mampu mendukung perekonomian rumah tangga.

Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan salah satu kecamatan penerima bantuan modal dalam dalam program (UP2K) usaha peningkatan pendapatan keluarga. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi di kecamatan tersebut, dimana masih banyak terdapat rumah tangga-rumah tangga miskin di tengah-tengah Kecamatan Pangkalan Kuras. Pengertian miskin pada kecamatan ini dapat dilihat dalam beberapa hal seperti, miskin perekonomian, dan juga miskin pola pikir. Terbatasnya lapangan pekerjaan serta terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dengan tingkat pendidikan yang tinggi merupakan berbagai masalah yang masih dihadapi pemerintah kecamatan dalam hal menanggulangi kemiskinan. Pencerminan kemiskinan di dalam pendidikan dan pola pikir terlihat pada sikap penduduknya yang pasif dan apatis serta menerima atau pasrah dengan kondisi dan suasana yang berkeinginan untuk berusaha merubah kondisi dan suasana yang telah ada tersebut. Kemiskinan penduduk ini diukur dengan pendapatan rumah tangga, yakni tingkat pendapatan yang rendah. Maka penduduk inilah yang sangat merasakan dampak krisis ekonomi dan moneter.

Adapun jumlah kelurahan/desa yang memperoleh bantuan penguatan modal dalam program UP2K di kecamatan Pangkalan Kuras pada tahun 2009-2010 adalah berjumlah 1 Kelurahan dan 9 Desa. Yang mana pada kelurahan/desa tersebut terdapat 1.319 rumah tangga miskin. Kemudian selama periode berjalannya program UP2K tersebut terlihat penurunan jumlah

rumah tangga miskin pada kelurahan/desa yang mendapat program UP2K tersebut menjadi 652 rumah tangga miskin.<sup>9</sup>

Besarnya modal yang diberikan berjumlah Rp. 10.000.000,- yang diperuntukkan kepada kelompok-kelompok keluarga miskin yang telah terbentuk.

Dengan pelaksanaan program tersebut diharapkan masyarakat penerima bantuan kemudian akan dapat meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Akan tetapi hasilnya tidak seratus persen sama seperti yang diharapkan. Karena berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di lapangan, tidak semua masyarakat penerima bantuan mengalami peningkatan alam pendapatan mereka. Akan tetapi bukan berarti tidak ada masyarakat yang mengalami peningkatan pendapatan setelah adanya dana program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) ini.<sup>10</sup>

Misalnya saja salah seorang warga yang bertempat tinggal di Desa Talau, sebelum adanya program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) Dia tidak memiliki usaha apapun selain bertani. Tetapi setelah adanya program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) saat ini dia sudah memiliki sebuah warung kecil yang dapat memberikan penghasilan yang lumayan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Pemerintah Kabupaten pelalawan, *Monografi Kecamatan Pangkalan Kuras*, (Pelalawan, 2010), h. 10

<sup>10</sup>Ibu Sri Nursari, Sekretaris PKK Kecamatan Pangkalan Kuras, *Wawancara*, 14 April 2011

<sup>11</sup>Ibu Neti, *Wawancara*, Talau, 20 April 2011

Bedasarkan kondisi riil di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“DAMPAK PROGRAM UP2K (UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA) TERHADAP PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN”**

### **B. Batasan Masalah**

Pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan tentang dampak pelaksanaan dana program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Segala bentuk kasus yang sama di tempat lain bukan bahasan dalam penelitian ini, selain itu juga difokuskan tentang konsep ekonomi Islam tentang pelaksanaan dana UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga)?

2. Bagaimana pelaksanaan program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang dampak UP2K (Upaya Peningkatan pendapatan Keluarga)?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga)?
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang dampak UP2K (Upaya Peningkatan pendapatan Keluarga)?
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
  - b. Sebagai bahan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan ke-Islaman, khususnya dalam bidang perbankan.
  - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*), penulis lakukan pada salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Pelalawan, yaitu Kecamatan Pangkalan Kuras. Penulis ingin meneliti di kecamatan ini, karena Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan salah satu kecamatan yang mendapat bantuan penguatan modal usaha dalam program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang diberikan secara bergulir oleh Pemerintah Provinsi Riau.

### **2. Subjek dan Objek**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh anggota PKK selaku penggerak dalam pelaksanaan dana UP2K (Upaya Peningkatan Pendapat Keluarga) ini serta seluruh keluarga-keluarga yang tergabung dalam anggota usaha bersama, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah dampak program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

### **3. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok UP2K yang terdapat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 135 orang. Dikarenakan banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 50% dari jumlah populasi yang ada yaitu berjumlah 68 orang saja. Adapun yang

sampel ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel dimana elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut *representative* atau mewakili populasi yang ada.

#### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan, yakni keluarga-keluarga yang menjadi anggota dana UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari ketua PKK Kecamatan Pangkalan Kuras selaku penggerak program UP2K, dokumen yang berkenaan dengan masalah ini serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Wawancara

Yaitu peneliti melakukan wawancara langsung kepada para responden dalam penelitian ini.

b. Observasi

Yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan peninjauan langsung ke- lapangan penelitian.

c. Angket

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengedarkan angket penelitian kepada para anggota UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga).

d. Studi dokumen

Yaitu mengambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen Kecamatan Pangkalan Kuras untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

## **6. Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa secara deskriptif analitik, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## **7. Metode Penulisan**

Setelah data-data terkumpul penulis mengolah dan menganalisanya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif analitik yaitu dengan cara mengumpulkan data-data lalu dianalisa, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membagi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penulisan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengenai gambaran keadaan geografis Kecamatan Pangkalan Kuras, keadaan penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras, Sumber penghalisan utama penduduk, keadaan ekonomi kecamatan pangkalan kuras. Dan gambaran umum UP2K di Kecamatan Pangkalan Kuras.

##### **BAB III : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini akan mengemukakan mengenai teori-teori yang akan melandasi pembahasan penelitian yang diperoleh melalui



telaah pustaka yaitu mencakup tentang pengertian kemiskinan, pendapatan, kesejahteraan, pengertian ekonomi kerakyatan.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai pelaksanaan program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan, dan tinjauan ekonomi Islam terhadap dampak program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupataen Pelalawan.

#### **BAB V : KESIMPULAN**

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis

Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah 847,37 KM<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 1250,72 jiwa/KM<sup>2</sup>. Sehingga tingkat kepadatan penduduk perkilometranya adalah 30 jiwa/KM<sup>2</sup>. Kecamatan Pangkalan Kuras terletak lebih kurang 114 KM dari pusat Ibukota Provinsi Riau dan lebih kurang 45 KM dari pusat Ibukota Kabupaten Pelalawan, secara administratif, wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras membawahi 1 kelurahan dan 16 desa yaitu:

1. Sorek Satu
2. Sorek Dua
3. Dundangan
4. Trantang Manuk
5. Palas
6. Kemang
7. Betung
8. Kesuma
9. Talau
10. Tj. Beringin
11. Surya Indah
12. Beringin Indah
13. Sialang Indah
14. Meranti
15. Harapan Jaya
16. Batang Kulim
17. Sido Mulyo<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pemerintah Kabupaten pelalawan, *Monografi Kecamatan Pangkalan Kuras*, (Pelalawan, 2010), h. 1

Sistem perhubungan di wilayah Kecamatan pangkalan Kuras ini terutama jalan-jalan umum dan sarana angkutan telah tersedia sehingga perhubungan di wilayah ini berjalan dengan lancar.

Pada umumnya wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki tipe iklim tropis dengan 2 musim yaitu kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret-Agustus dan musim hujan terjadi pada bulan September-Maret.

Adapun Kecamatan Pangkalan Kuras berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Pkl. Kerinci

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Pkl. Lesung

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Langgam

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Bunut

Kemudian potensi yang menonjol di Kecamatan Pangkalan Kuras adalah Perikanan, Perkebunan (sawit dan karet), dan Perdagangan.<sup>2</sup>

## **B. Keadaan Penduduk**

### **1. Penduduk dan Perkembangannya**

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. Penduduk memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian wilayah dalam upaya meningkatkan produksi dan mengembangkan roda kegiatan usaha ekonomi suatu wilayah tersebut.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Dengan demikian peneliti mengkaji beberapa aspek dari penduduk daerah kecamatan pangkalan Kuras, untuk menjadi tolak ukur dalam kuantitas maupun kualitas tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi serta meningkatkan kemampuan dalam menanggulangi permasalahan yang timbul dengan harapan terciptanya lapangan kerja, lapangan usaha dan kesempatan untuk berusaha memenuhi kehidupan masyarakat.

Gejala lain yang terdapat di dalam masalah kependudukan adalah dinamika penduduk, perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk yang menyebabkan perubahan serta perkembangan jumlah penduduk Kecamatan pangkalan Kuras. Jumlah kepala keluarga di Kecamatan Pangkalan Kuras berjumlah 10.144 KK.

Tabel berikut ini akan digambarkan jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras menurut jenis kelamin.

**TABEL 1**  
**PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN**  
**PANGKALAN KURAS PADA TAHUN 2010**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Laki-laki	24.396	53%
2.	Perempuan	21.648	47%
	Jumlah	46.044	100%

Sumber : Monografi Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2010

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Pangkalan Kuras pada tahun 2010, yaitu laki-laki berjumlah 24.396 orang atau 53% dari jumlah penduduk keseluruhan dan perempuan berjumlah 21.648 orang

atau 47% dari jumlah penduduk keseluruhan. Melihat jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam segala aspek kegiatan ekonomi, dimana penduduk merupakan faktor penggerak terutama di pedesaan dan di perkotaan baik dalam bidang perdagangan, pertanian, maupun industri, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Faktor penduduk dan implikasi lainnya merupakan faktor yang penanganan secara serius.

## 2. Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk dapat dikaitkan ketenagakerjaan dan beban tanggungan penduduk usia produktif. Yang dimaksud penduduk usia produktif adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun. Komposisi penduduk menurut umur pada Kecamatan Pangkalan Kuras dapat dilihat pada table di bawah ini.

**TABEL 2**  
**PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI KECAMATAN**  
**PANGKALAN KURAS PADA TAHUN 2010**

No	Kelompok umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase
1.	< 15	19.066	41,4%
2.	16-64	26.409	57.3%
3.	64 keatas	569	1.2%
	Jumlah	46.044	100%

Sumber : Bagian Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Tahun 2010

Seperti yang terlihat pada tabel diatas komposisi penduduk menurut umur di Kecamatan Pangkalan Kuras untuk kelompok umur 16 – 64 tahun atau usia produktif merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 26.409 orang atau 57.3%, kemudian untuk kelompok umur >15 tahun berjumlah 19.066 orang atau 41.4%. dan untuk untuk yang berumur 64 ke atas ada sebanyak 569 orang atau 1.2%.

### 3. Agama dan Kepercayaan

Dilihat dari Agama dan Kepercayaan penduduk Kecamatan Bunut mayoritas beragama islam, yakni 10.107 jiwa yakni 98,63% , beragama kristen protestan 94 jiwa yakni 0,61%. Kristen khatolik 20 jiwa yakni 0,19%. Beragama Hindu 13 jiwa yakni 0,14%. Beragama Budha 11 jiwa yakni 0,10%. untuk lebih jelas penulis menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**TABEL 3**  
**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PANGKALAN KURAS MENURUT**  
**AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

No	Agama dan Kepercayaan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Islam	41.229	92.99%
2.	Kristen Protestan	1.500	3.38%
3.	Kristen Khatolik	1.588	3.58%
4.	Hindu	5	0.01%
5.	Budha	11	0.02%
	Jumlah	44.333	100%

Sumber : Monografi Kecamatan Pangkalan Kuras

Dari tabel diatas maka dapat diketahui, bahwa jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras yang beragama Islam merupakan yang mayoritas yaitu 41.229 orang dari total jumlah penduduk yang ada atau

sama dengan 92.99%. Kemudian penduduk yang beragama Kristen protestan adalah berjumlah 1.500 orang atau sama dengan 3.38%. Sementara itu penduduk yang beragama Kristen katolik adalah 1.588 dari total jumlah penduduk yang ada atau sama dengan 3.58%. Kemudian agama Hindu merupakan yang paling sedikit pemeluknya di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu 5 orang dari total penduduk yang ada atau sama dengan 0.01%. kemudian setelah Hindu, Budha adalah agama yang juga sedikit pemeluknya di Kecamatan Pangkalan Kuras yaitu berjumlah 11 orang dari total penduduk yang ada atau sama dengan 0.02%.

### C. Sumber Penghasilan Utama penduduk

Pada suatu wilayah atau daerah, memiliki penduduk dan usaha yang berbeda-beda. Dan berikut adalah komposisi penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras menurut mata pencarian penduduknya yang didapat dari hasil data monografi Kecamatan Pangkalan Kuras pada tahun 2010.

**TABEL 4**  
**JUMLAH PENDUDUK (KK) KECAMATAN PANGKALAN KURAS**  
**YANG BEKERJA BERDASARKAN SEKTOR USAHA DILAPANGAN**  
**PEKERJAAN PADA TAHUN 2010**

No	Kelompok umur (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Pertanian (petani/buruh tani)	9.153	84.6%
2.	Perdagangan ( harian, dll) dan rumah makan.	1.017	9.4%
3.	Jasa	330	3%
4.	Lainnya (pegawai, sekolah, pensiunan, dll)	309	2.8%
	Jumlah	10.809	100%

Sumber : Monografi Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2010

Dari tabel diatas ini dapat kita lihat bahwa penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras yang berkerja di bidang pertanian baik itu buruh tani atau yang memiliki lahan sendiri berjumlah 9.153 KK atau 84.6%, sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pedagang baik itu pedagang harian, pedagang pakaian dan rumah makan berjumlah 1.017 KK atau 9.4%. kemudian penduduk yang bekerja dibidang jasa baik mjasa angkutan dan maupun jasa pelayanan berjumlah 330 KK atau 3% dari jumlah KK yang ada. Sisanya adalah penduduk (KK) yang bekerja sebagai pegawai, pensiunan, dan yang masih sekolah yaitu berjumlah 225 KK atau 2.8% dari jumlah KK yang ada.

#### **D. Kondisi Ekonomi Kecamatan Pangkalan Kuras**

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu daerah yaitu dengan melihat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) - nya. PDRB yaitu merupakan nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah domestic/regional, yang biasanya di Kabupaten atau kota. Untuk Kecamatan Pangkalan Kuras dapat kita lihat melalui PDRB Kabupaten Pelalawan yang dapat dilihat pada tabel berikut:



**TABEL 5**  
**DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN PELALAWAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU**

No	Lapangan usaha	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan,	40.43	39.35	37.75	35.24
2.	Perikanan	0.06	0.06	0.06	0.06
3.	Pertambangan dan Penggalian	52.74	53.89	55.63	58.14
4.	Industri pengolahan	0.09	0.08	0.08	0.08
5.	Listrik, Gas dan Air Minum	1.45	1.5	1.46	1.42
6.	Bangunan	1.43	1.4	1.42	1.48
7.	Perdagangan, Hotel dan Restaurant	0.95	0.9	0.83	0.77
8.	Pengangkutan dan Komunikasi	0.97	0.96	0.95	0.95
9.	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa-jasa	1.89	1.85	1.83	1.87
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan 2010

Dari tabel diatas dapat kita lihat besarnya sumbangan dari tiap-tiap lapangan usaha yang ada di Kabupaten Pelalawan. Yang mana sumbangan masing-masing lapangan usaha berubah dari tahun-ketahun. Distribusi tiap sektor ekonomi terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Pelalawan di tahun 2009 agak sedikit menurun. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengaruh sektor yang menyumbang mengalami penurunan yang diakibatkan fluktuasi nilai tukar Rupiah yang tidak tetap.<sup>3</sup>

Sekitar 9.153 atau 85.3% penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras bekerja sebagai petani/buruh tani, yang menghabiskan waktu bekerja dari pagi hingga sore. Meskipun demikian kadang pendapatan yang diperoleh masih belum mencukupi. Akan tetapi kebanyakan masyarakat menerima keadaan ini begitu saja, tanpa ada usaha untuk memperbaiki keadaan

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Pelalawan Dalam Angka*, (Pelalawan, 2010), h, 178

ekonomi mereka. Sehingga mereka terperangkap dalam kemiskinan. Hal ini bisa saja disebabkan karena kurangnya keahlian masyarakat atau juga bisa diakibatkan minimnya modal yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga tidak ada usaha yang dapat dilakukan selain menerima kondisi perekonomian yang sudah ada.

Melihat kondisi ini maka peran pemerintah sangat penting, terutama untuk memberikan bantuan dalam hal pelatihan serta penguatan modal agar masyarakat yang hidup dalam keterbatasan (keahlian dan modal) dapat terbantu untuk memperbaiki kondisi ekonominya, karena hal ini merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

Kebanyakan dari masyarakat meperoleh uang pinjaman secara cepat tanpa memperdulikan bunga yang harus dibayar nantinya. Misalnya saja di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan mengatasnamakan koperasi tertentu memberikan pinjaman dengan boroh dan prosedur lainnya. Masyarakat pada umumnya membayar dengan system cicilan, hingga terkadang rumahpun ikut terjual. Disisi lain sarana ekonomi perbankan yang resmi juga ada seperti: BRI, KUD dan lain-lainnya sarana mengutamakan prosedur dan jaminan sesuai dengan besarnya pinjaman.

Berikut adalah tabel jumlah sarana perekonomian dirinci menurut jenisnya di Kecamatan Pangkalan Kuras tahun 2010.

**TABEL 6**  
**JUMLAH SARANA PEREKONOMIAN DIRINCI MENURUT JENISNYA**  
**DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS TAHUN 2010**

No	Jenis sarana perekonomian	Jumlah	Persentase
1.	Pasar umum	6	40%
2.	Bank	3	20%
3.	Koperasi	6	40%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Monografi Kecamatan Pangkalan Kuras tahun 2010

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat sekitar 6 atau 40% pasar umum, artinya pasar yang didalamnya terdapat semua jenis perdagangan. Kemudian selain itu juga terdapat sarana ekonomi lain yaitu bank yang berjumlah 3 unit atau sekitar 20%. Selain itu juga koperasi menjadi sarana perekonomian di Kecamatan Pangkalan Kuras ini yang berjumlah 6 unit atau sekitar 40%.

#### **E. UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**

Untuk mencoba mengatasi kemiskinan pemerintah Provinsi Riau melakukan upaya pemberian bantuan yang direalisasikan dalam bentuk bantuan pemberian modal untuk usaha khususnya masyarakat miskin atau kurang mampu, yang dinamakan Upaya Peningkatan Pendapatan keluarga (UP2K), hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang benar-benar dianggap berhak menerimanya.

Ruang lingkup dari program UP2K yang diberikan di Kecamatan Pangkalan Kuras adalah kegiatan ekonomi sosial yang bersifat mendidik masyarakat yang handal tanpa menganggap bahwa dana program UP2K adalah dana hibah. Program ini diprioritaskan kepada masyarakat

berpendapatan rendah atau minim modal sereta mempunyai keinginan untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya. Umumnya mereka tidak mempunyai modal cukup untuk meningkatkan pendapatan mereka, atau lebih tepatnya pendapatan yang mereka peroleh sehari-hari hanya cukup buat kebutuhan sehari-hari, tanpa adanya penambahan modal dari pendapatan. Sehingga hal ini menyebabkan usaha mereka tidak berkembang atau bahkan bangkrut.

Dalam pelaksanaan program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan keluarga) masing-masing kelompok UP2K yang telah terbentuk mendapatkan bantuan modal usaha masing-masing adalah berjumlah Rp 10.000.000 per kelompok. Yang nantinya ketua kelompok akan menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing anggota sesuai kesepakatan.

Ada beberapa persyaratan untuk lokasi yang mendapat bantuan penguatan modal dalam program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) bagi pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:

**a. Persyaratan Kelompok Penerima Bantuan Program UP2K bagi Pembangunan Perempuan di Pedesaan**

1. Kelompok UP2K yang telah mendapat SK dari ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
2. Memiliki usaha yang produktif dan berkelanjutan.
3. Jumlah anggota kelompok, terdiri dari 7 orang atau paling banyak 10 orang.
4. Memiliki struktur organisasi dan administrasi keuangan.
5. Memiliki tempat usaha yang tetap.

6. Tidak sedang menerima bantuan dari program lain, baik dari APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/Kota.
7. Penentuan kelompok yang mendapat dan bantuan program UP2K bagi pembangunan perempuan di Pedesaan disampaikan melalui PMD Kabupaten/Kota atau sebutan lain ke BPPM Provinsi.
8. Usaha kelompok penerima bantuan difasilitasi oleh PMD Kabupaten/Kota atau sebutan lain bekerjasama dengan Tim penggerak PKK (Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa) dan melibatkan tokoh-tokoh perempuan dan organisasi.

**b. Jenis-jenis Usaha yang Dapat Didanai dari Program UP2K bagi Pembangunan Perempuan di Pedesaan antara lain:**

1. Pertanian (Lebah madu, pembibitan, Sayur-mayur)
2. Perikanan (Keramba ikan, Ikan salai, Ikan Asin)
3. Perkebunan (Pembibitan kelapa sawit, Karet, Cabe)
4. Industri Rumah tangga (Kerajinan, anyaman, Bordir, makanan, dan Minuman)
5. Jasa (warung PKK, kelontong, dagang keliling)
6. Usaha simpan pinjam

**c. Pengorganisasian bantuan UP2K bagi pembangunan perempuan di pedesaan.**

Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan UP2K provinsi Riau maka perlu di bentuk tim koordinasi yang menangani bantuan

tersebut mulai dari tingkat Provinsi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan suasana sebagai berikut:

1. Provinsi

- 1) Gubernur selaku penanggung jawab
- 2) Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku pengarah
- 3) Kepala Bappeda selaku pengarah
- 4) Kepala BPPM Provinsi Riau selaku pelaksana
- 5) Ketua TP PKK Provinsi selaku wakil ketua pelaksana
- 6) Kabid PP BPPM Provinsi selaku sekretaris
- 7) Anggota tim koordinasi yang terdiri dari dinas dan badan terkait dan pengurus PKK Provinsi
- 8) Sekretariat Bantuan Program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) bagi pemberdayaan perempuan di pedesaan berada di kantor BPPM Provinsi Riau ditetapkan dengan SK Kepala BPPM Provinsi Riau

**d. Susunan kepengurusan organisasi bantuan Program UP2K bagi pemberdayaan perempuan di pedesaan Provinsi Riau ditetapkan dengan SK Gubernur provinsi Riau.**

Susunan kepengurusan organisasi bantuan program UP2K di tingkat kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota selaku penanggung jawab
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku pengarah
3. Kepala Bappeda selaku pengarah

4. Kepala PMD kabupaten/Kota atau sebutan lain selaku ketua pelaksana
5. Ketua PKK Kabupaten/Kota selaku wakil ketua pelaksana
6. Kabag pemberdayaan perempuan atau yang menangani bidang pemberdayaan perempuan Kabupaten/Kota
7. Anggota tim koordinasi yang terdiri dari dinas dan badan terkait dan pengurus PKK Kabupaten/Kota
8. Sekretariat bantuan UP2K berada di Kantor PMD Kabupaten/Kota atau sebutan lain ditetapkan dengan SK kepala PMD kabupaten/Kota

Kemudian yang menjadi tugas dan tanggung jawab tim koordinasi Kabupaten/Kota meliputi:

1. Menyediakan dana sharing bantuan penguatan modal usaha program UP2K bagi pemberdayaan perempuan di pedesaan di pedesaan dari APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan keuangan APBD masing-masing.
2. Melakukan sosialisasi program di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Memberikan masukan dan sarana dari tim koordinasi Kabupaten/Kota kepada tim koordinasi Provinsi untuk perbaikan program bantuan UP2K di pedesaan di masa yang akan datang.
4. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan dana bantuan UP2K.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan program UP2K di pedesaan tembusannya disampaikan kepada Bupati/WaliKota yang

bersangkutan dan tim penggerak PKK Provinsi serta tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota.

Sementara itu susunan kepengurusan organisasi bantuan program UP2K di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat selaku penanggung jawab
2. Ketua TP PKK Kecamatan selaku ketua pelaksana
3. Kasi PMD atau sebutan lain selaku sekretaris
4. Anggota Tim koordinasi Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
5. Sekretariat bantuan Program UP2K bagi pemberdayaan perempuan di pedesaan di Kantor Camat bagian Kasi PMD

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim penggerak Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi program di tingkat Desa/Kecamatan.
2. Melakukan pembinaan, pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan dan bantuan .
3. Memberikan masukan dan sarana kepada Tim koordinasi Kabupaten/Kota untuk perbaikan Program bantuan program UP2K bagi pemberdayaan perempuan di Pedesaan di masa yang akan datang.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan program UP2K bagi pemberdayaan perempuan di pedesaan kepada Bupati/Walikota atau sebutan lain.



Kemudian susunan organisasi bantuan Program UP2K bagi pemberdayaan perempuan di Pedesaan APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten/Kota di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan SK kepala Desa/Kelurahan. Adapun bentuk susunan organisasi UP2K di tingkat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa/kelurahan selaku ketua pelaksana
2. Ketua TP PKK Desa/kelurahan selaku wakil ketua pelaksana
3. Kaur penmbangunan selaku sekretaris
4. Anggota terdiri dari LPM, BPD, pemuka masyarakat dan tokoh perempuan
5. Ditetapkan dengan SK kepala Desa/Lurah

Sementara itu, tugas dan tanggung jawab tim penggerak PKK Desa/kelurahan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi program UP2K bagi pemberdayaan perempuan di pedesaan di tingkat Dusun, RT/RW
2. Melakukan pembinaan, pemantauan dan monitoring terhadap kelompok UP2K penerima bantuan program UP2K
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan bulanan secara berkala kepada Camat
4. Memfasilitasi musyawarah yang menyangkut dengan kegiatan UP2K
5. Membantu kelancaran pelaksanaan program UP2K di tingkat Desa/Kota

Adapun jumlah rumah tangga dan rumah tangga miskin di Kecamatan Pangkalan Kuras dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 7**  
**JUMLAH RUMAH TANGGA DAN RUMAH TANGGA MISKIN DI**  
**KECAMATAN PANGKALAN KURAS PADA TAHUN 2009 :**

No	Desa/Kelurahan	Jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga miskin
1.	Sorek Satu	2.749	411
2.	Sorek Dua	624	167
3.	Dundangan	652	112
4.	Palas	365	64
5.	Kemang	547	69
6.	Betung	282	90
7.	Talau	224	51
8.	Surya Indah	412	260
9.	Sialang Indah	465	131
10.	Harapan Jaya	327	32
11.	Kesuma	1.125	73
12.	Tj. Beringin	332	46
13.	Beringin Indah	350	133
14.	Meranti	370	63
15.	Batang Kulim	760	151
16.	Sido Mukti	356	53
17.	Trantang Manuk	689	123
	<b>Jumlah</b>	<b>10.809</b>	<b>2.029</b>

Sumber: Monografi Kecamatan Pangkalan Kuras

Dari tabel di atas dapat diketahui banyaknya rumah tangga dan rumah tangga miskin di tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kuras. Dan kemudian dari data-data di atas akan ditentukan kelompok-kelompok keluarga miskin yang akan menerima bantuan modal usaha dalam program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin tersebut. Berikut adalah jumlah rumah tangga miskin tahun 2009 dan 2010 saat berjalannya program tersebut.

### **BAB III**

#### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Kemiskinan**

##### **a. Pengertian Kemiskinan**

Pendapat mengenai kemiskinan ini sangat beragam. Beberapa ahli ekonomi menagrtiakan kemiskinan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Misalnya Oscar Lewis, seorang antropologi Amerika memaknai kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan.<sup>1</sup>

Para ahli ekonomi konvensional memberikan beberapa konsep kemiskinan yaitu sebagai berikut (1) garis kemiskinan yang dikaitkat dengan kebutuhan konsumsi minimum sebuah keluarga atau sering disebut kemiskinan primer. Indikatornya adalah dua pertiga pendapatan habis buat makan, (2) kemiskinan absolute dan kemiskinan relative. Kemiskinan absolute ditandai oleh keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan relative adalah kelurga yang berada diatas garis kemiskinan tetapi rentan terjerambab dalam kubangan kemiskinan, (3) kemiskinan massal atau kantong kemiskinan adalah kemiskinan yang melanda suatu Negara atau wilayah dan hal ini membuatnya menjadi kompleks dalam proses mengatasinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Teori MakroEkonomi Islam “konsep, teori, analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 229

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), h. 121.

Pengukuran kemiskinan di Indonesia mengacu pada standar WHO. Dimana seseorang dikatakan miskin jika hanya memenuhi kebutuhan kalori minimal 2100 kalori perhari plus kebutuhan pokok lain diluar makan. Kebutuhan pokok selain makanan meliputi perumahan (penerangan, bahan bakar, dan air bersih), pakain, beberapa barang yang tahan lama, dan berbagai jasa yang jika dirupiahkan nilainya berubah dari tahun ke tahun.<sup>3</sup>

Dalam ekonomi Islam masalah kemiskinan juga menjadi bahasan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Perhatian Islam terhadap masalah kemiskinan ini sangat besar, salah satu buktinya adalah dengan adanya ketentuan *daf'u dharari ma'sum* (penanggulangan kemelaratan yang diderita dan merendahkan martabat manusia), yang dalam prespektif fiqh termasuk *fardhu kifayah*.<sup>4</sup> Artinya sudah menjadi kewajiban umat Islam yang mampu membantu umat Islam yang tidak mampu.<sup>5</sup>

Islam dalam prinsipnya menentang persepsi bahwa kemiskinan adalah sarana penyucian jiwa yang harus dipelihara dan dipertahankan, islam juga menolak asumsi bahwa kemiskinan adalah kondisi yang harus diterima apa adanya, karena ia merupakan takdir tuhan yang merupakan harga mati. Artinya kemiskinan harus dientaskan karena sesungguhnya kemiskinan banyak membuat kemelaratan. Jadi, Islam menekankan

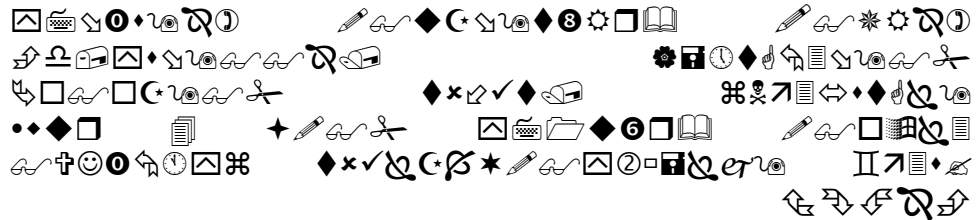
---

<sup>3</sup> Muahammad Arsjad, dkk, *Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 149

<sup>4</sup>Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Zakat*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 138

<sup>5</sup>DR. M. Umer Chapra, *"Islam dan Tantangan Ekonomi"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h 214.

distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 105:



Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat (Q.S. Al-Nisa 105)<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut maka jelaslah bahwa setiap individu berhak memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inheren dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Hal ini selaras dengan salah satu prinsip ekonomi islam, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30:



Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."... (Q.S. 2:30)<sup>7</sup>

## b. Ciri-ciri Penduduk Miskin

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV. Diponegoro IKAPI, 2005), h. 76

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 6

Dalam sudut pandang Islam, kategori miskin terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu sebagai berikut:

- a. Miskin iman, yaitu orang yang jiwanya tidak ada kontak atau hubungan dengan Allah, atau jika ada hubungan pun terlalu sedikit atau tipis, yaitu ingat kepada Allah hanya pada waktu susah saja
- b. Miskin ilmu, miskin ilmu merupakan salah satu penyebab mengapa manusia susah, miskin dan tidak tau cara menyelesaikan masalah hidup.
- c. Miskin harta, jadi dari sini baru dapat difahami bahwa miskin harta, yakni tidak dapat memenuhi makan minum, tidak dapat membangun rumah dan lain sebagainya merupakan buah dari manusia yang tidak ada kontak dengan ilmu dan juga buah dari manusia yang tidak memiliki ilmu.<sup>8</sup>

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, serta keterprukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya akses kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Kemiskinan juga menghambat demokrasi, keadilan dan persatuan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Karena itu langkah-langkah yang diambil adalah penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin,

---

<sup>8</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *op. cit.* h. 231-232

pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, serta pengembangan keswadayaan masyarakat miskin.<sup>9</sup>

Dalam Islam ada dua Madzhab dalam menjelaskan tentang siapa sebenarnya yang disebut miskin itu. Pertama, madzhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai sesuatupun juga. Kedua, madzhab Hambali dan Syafi'i yang menyatakan miskin itu adalah orang yang mempunyai seperdua dari keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Dalam kehidupan kita, biasanya kata miskin dijadikan kata majemuk dengan faqir, sehingga menjadi faqir miskin yang artinya kurang lebih sama.

Sementara itu Michael P. Todaro dalam bukunya menyebutkan, salah satu generalisasi (anggapan sederhana) yang paling sah (*valid*) mengenai penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya hidup di pedesaan, dengan berbagai mata pencarian yang erat hubungannya dengan sektor tradisional seperti bidang pertanian.<sup>10</sup> Sebagai contoh telah diketahui bahwa sekitar dua per tiga penduduk miskin di Negara-negara berkembang masih banyak yang menggantungkan hidup mereka dari pola pertanian yang subsisten, baik sebagai petani kecil ataupun buruh tani yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya Todaro juga menyebutkan dalam bukunya bahwasanya kebanyakan dari penduduk miskin adalah wanita dan anak-anak daripada laki-laki dewasa, dan mereka sering dikonsentransikan di antara kelompok etnis minoritas dan

---

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Moderen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 17

<sup>10</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 169

penduduk pribumi.<sup>11</sup> Kemudian fakta lain membuktikan bahwa sepertiga penduduk miskin kebanyakan juga tinggal di pedesaan dan mereka mengandalkan semata-mata hidupnya dari usaha jasa kecil-kecilan, dan sebagian bertempat tinggal di daerah-daerah sekitar atau pinggiran kota kampung-kampung kumuh di pusat kota dengan dengan berbagai macam mata pencarian rendah seperti penyapu jalan, pedagang asongan, kuli kasar.<sup>12</sup>

Kemudian dalam bukunya, Ismail Nawawi mengemukakan beberapa ciri-ciri penduduk miskin yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Mereka hidup dibawah garis kemiskinan, pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan. Faktor produksi umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi.
3. Tingkat pendidikan golongan miskin pada umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar, waktu mereka pada umumnya habis untuk bekerja sehingga tidak ada kesempatan untuk belajar, begitupun dengan anak-anak mereka karena mereka harus membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah tambahan.

---

<sup>11</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi "di Dunia Ketiga"*, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 184

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit*, h. 126



4. Banyak diantara mereka tinggal di pedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan atau kalaupun ada relative kecil. Dan pada umumnya mereka adalah buruh tani atau sebagai pekerja kasar.

### c. Langkah-langkah Mengatasi Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer of payment* dari pemerintah. Misalnya program pangan, kesehatan, permukiman, pendidikan maupun usaha yang bersifat produktif, misalnya melalui pinjaman dalam bentuk kredit mikro.<sup>14</sup>

Dalam memperbaiki kondisi ketimpangan distribusi pendapatan serta menanggulangi kemiskinan ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Negara yaitu:

1. Perbaikan distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah harga-harga faktor produksi. Sehingga terdapatnya harga-harga faktor produksi yang terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat.
2. Perbaikan distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif kepemilikan asset-aset.
3. Pengalihan sebagian pendapatan golongan atas ke golongan bawah melalui penerapan pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif.

---

<sup>14</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 52

4. Peningkatan ukuran distribusi kelompok penduduk termiskin melalui pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa konsumsi atas tanggungan pemerintah.<sup>15</sup>

Sementara dalam Islam terdapat beberapa langkah taktis hasil penelitian Yusuf Qardhawi mengenai cara pengentasan kemiskinan yaitu:

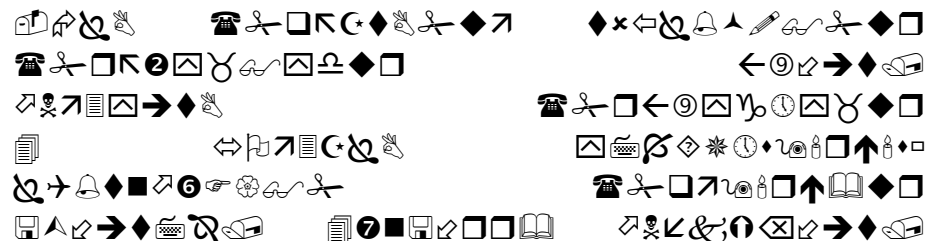
1. Menggalakkan kerja dikalangan kaum miskin, baik dengan menyemangati maupun dengan cara memberikan lapangan pekerjaan. Kaum miskin harus terus diangkat etos dan semangat kerjanya.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Mulk ayat 15:



Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.(Q.S. 67:15)<sup>16</sup>

2. Mengusahakan jaminan dari kerabat yang kaya, dimana mereka akan turut membantu kerabatnya yang miskin. Sebagaimana yang di firmankan dalam Al-qur'an suart Al-Anfal ayat 75:



<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Op. Cit* , h. 200  
<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *loc. Cit*, h. 449



Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. 8: 75)<sup>17</sup>

3. Mengoptimalkan pemungutan zakat dan pendistribusiannya.
4. Jaminan dari pembendaharaan Negara (baitul maal)
5. Mewajibkan beberapa pungutan lain yang dilakukan diluar zakat untuk kaum muslim
6. Mengajukan sedekah yang sifatnya sukarela

Adapun bagian-bagian penting dari system penangan masalah kemiskinan dari ajaran Islam yang telah dijabarkan dalam fiqih adalah terdiri dari beberapa sub system, sebagaimana berikut, yaitu:

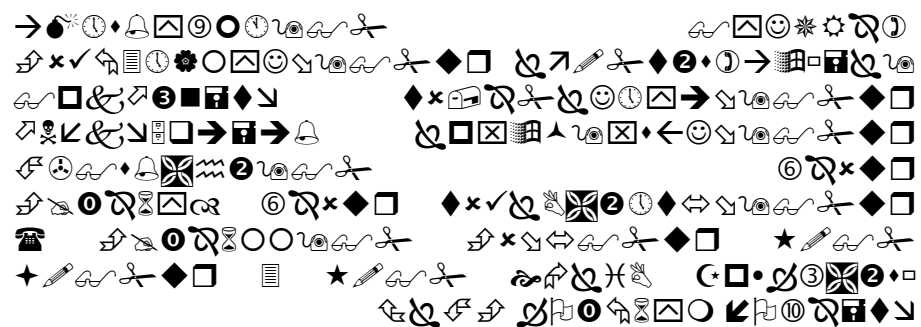
1. Sub Sistem Penyediaan Dana, maksudnya sub sistem ini menjabarkan landasan pengintegrasian upaya-upaya meningkatkan perekonomian umat kedalam masalah ibadah, sehingga ibadah-ibadah tersebut mempunyai aspek kemasyarakatan yang nyata. Seperti misalnya; zakat, waqaf, ghanimah, nuzur, shadaqah, baitul mal.
2. Sub Sistem pemanfaatan Dana, maksudnya dana-dana yang diperoleh dari yang telah dipaparkan pada bagian (1) tersebut pada garis besarnya disalurkan kepada golongan tertentu dalam masyarakat bersangkutan diantaranya yang terpenting adalah diperuntukkan untuk

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 149

golongan melarat yang keadaannya di bawah garis kemiskinan (*fuqara*) dan golongan prioritas berikutnya dipruntukkan bagi golongan melarat yang kekurangan. Yakni tidak mencapai batas kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya.<sup>18</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya sebagai berikut:



Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".( Q.S At-Taubah : 60)<sup>19</sup>

**B. Pendapatan**

**a. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan atau penghasilan adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu biasanya terdapat perbedaan. Keadaan ini wajar terjadi karena setiap individu memiliki perbedaan keahlian dibidang

<sup>18</sup> Djamal Doa, *Op. Cit.* h 155-156  
<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h, 156

masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu yang tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden), serta tunjangan dari pemerintah.<sup>20</sup>

#### **b. Penyebab Pendapatan Masyarakat Tidak Merata**

Adapun yang menyebabkan pendapatan masyarakat tidak merata adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan dan keahlian masyarakat yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan dalam hal mata pencarian
- b. Perbedaan jabatan masyarakat sehingga menghasilkan pendapatan yang berbeda pula
- c. Perbedaan dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan investasi di masa yang akan datang.
- d. Perbedaan dalam kehidupan rumah tangga serta masyarakat.<sup>21</sup>

Ada beragam sumber pendapatan keluarga, ini dikarenakan anggota keluarga yang bekerja melakukan beragam kegiatan usaha dan atau masing-masing anggota rumah tangga mempunyai kegiatan yang berbeda satu sama lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi keragaman pendapatan keluarga adalah penguasaan faktor produksi. Pendapatan itu sendiri diperoleh sebagai hasil bekerja atau jasa asset dan sumbangan dari

---

<sup>20</sup> Paul A Samuelson dan William D Nordhaus, *Ilmu Makroekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), h. 417

<sup>21</sup>*ibid*, h. 427

pihak lain. Kumpulan pendapatan tersebut merupakan modal total rumah tangga.

Sementara itu pendapatan adalah merupakan penghasilan dari seluruh anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun perorangan anggota rumah tangga. Pendapatan seseorang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh sebab itu dengan berubahnya pendapatan seseorang maka akan berubah pula besarnya pengeluaran mereka dalam mengkonsumsi suatu barang. Jadi, pendapatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi konsumsi seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang.<sup>22</sup> Itulah mengapa tingkat pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

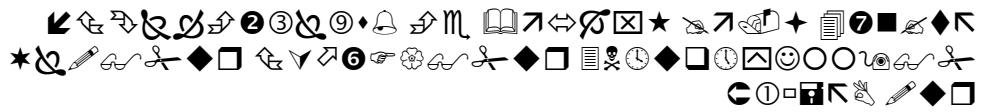
Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, bahwa salah satu dari penyebab kemiskinan adalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Oleh karena itu Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam memelihara keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Inilah mengapa dalam ekonomi Islam tidak ada kepemilikan mutlak, karena sesungguhnya sang pemilik mutlak itu hanyalah Allah SWT. Manusia hanyalah wakil Allah (khalifah) yang diberi amanat untuk memanfaatkannya.<sup>23</sup>

Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 189:

---

<sup>22</sup>Sadono Sukirno, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 36

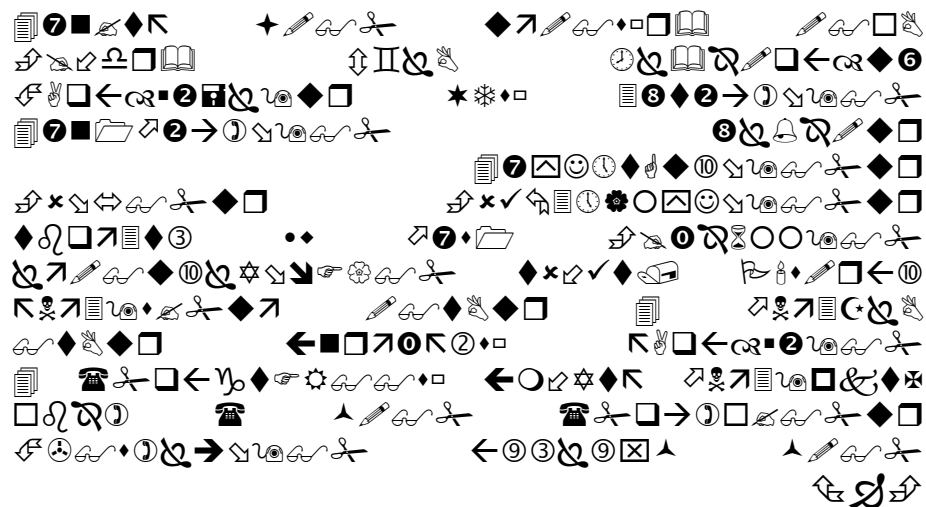
<sup>23</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Penegalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada media Group, 2007), h. 122



Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.”(Q.S. 3: 189)<sup>24</sup>

Untuk itu dalam ekonomi Islam tidak mengenal kepemilikan mutlak, karena sebagaimana yang disebutkan pada bahasan pertama bahwa dari setiap harta milik seseorang maka ada hak orang lain didalamnya (fakir miskin). Guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan-kesenjangan dalam masyarakat muslim diakui sepanjang penyebabnya adalah perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan risiko. Akan tetapi kesenjangan yang terlalu melenceng tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan hanya karunia Allah bagi semua manusia, melainkan juga sebagai suatu amanah.<sup>25</sup> Karena itu tidak ada alasan mengapa sumber-sumber daya itu harus terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Sebagaimana yang di tegaskan Allah dalam Surat Al-Hasyr ayat 7:



<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 59

<sup>25</sup>DR. M. Umer Chapra, *Op. Cit*, h 214.

*Artinya:* “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Q.S. Al-Hasyr:7)<sup>26</sup>

Kurangnya program efektif untuk memproduksi kesenjangan-kesenjangan ini akan mengakibatkan penghancuran, dan bukannya penguatan persaudaraan yang dikehendaki oleh Islam.

## **C. Kesejahteraan**

### **a. Pengertian Kesejahteraan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah, berarti aman sentosa dan makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seorang manusia merasa hidupnya sejahtera.<sup>27</sup>

Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih mendekati pengertian itu kepada perasaan yang hidup di masyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.<sup>28</sup> Karena itu,

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 436

<sup>27</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 270

<sup>28</sup>Sarbini, Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 99



kesejahteraan secara adil hanya ada jika dapat diasjikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, kesejahteraan memerlukan keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi dibarengi dengan pemerataan yang adil.

Keadilan social adalah sebuah nilai keutamaan yang diajarkan Islam. Karena itulah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbagi rasa, baik melalui zakat, sadaqah, hibah, wakaf, maupun wasiat, agar terciptanya kondisi hidup sejahtera dikalangan manusia.<sup>29</sup>

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapatkan rasa kesejahteraan ini, dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatannya mereka terutama pada kebutuhan hidup: makanan dan perumahan.<sup>30</sup>

Kemudian pertanyaanya siapakah yang kemudian bertanggung jawab terhadap masyarakat ini. Kemudian Islam menjawab pertanyaan ini dengan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya. Ada jaminan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara umat dengan umat lainnya, dan satu lapisan masyarakat dengan lapisan masyarakat lainnya secara timbal balik.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Djamal Doa, *Op. Cit.* h, 142

<sup>30</sup> Paul A Samuelson dan William D Nordhaus, *Op. Cit.* h, 127

<sup>31</sup> Akhmad Mujahidin, *Op. Cit.* h. 100

Rasulullah menggambarkan tanggung jawab seseorang bagi perlindungan sosial dalam sabdanya sebagai berikut:

الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ:  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
 فَلِإِمَامٍ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ  
 زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
 :فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ( )

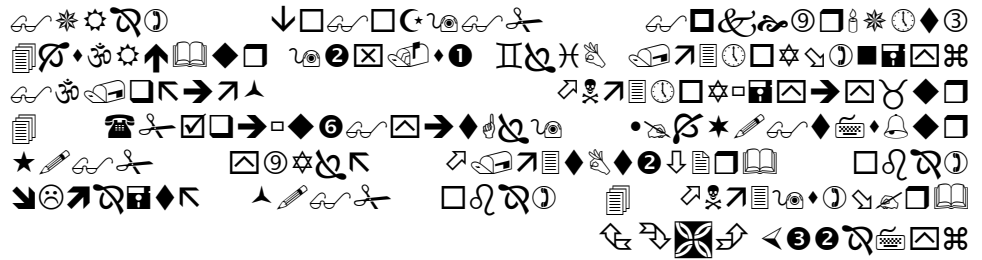
Artinya: “diriwayatkan dari Abu Yamani telah mengabarkan akan kami Su’aib dari zahri berkata: telah mengabarkan akan kami Salim bin ‘abdillah dari ‘abdillah bin umar r.a bahwasanya dia mendengar Rasulullah Saw berkata: setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya, dan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan seorang perempuan adalah pemimpin atas harta suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan pembantu bertanggung jawab atas harta tuannya, : dan sekiranya mereka mendengar bahwa berkata: dan seorang laki-laki bertanggung jawab atas harta ayahnya,“setiap kamu adalah pemimpin (pemberi perlindungan) dan bertanggung jawab atas yang kamu pimpin di hari kiamat)”. (HR Bukhari)<sup>32</sup>

## b. Pentingnya Pemerataan Kesejahteraan

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan

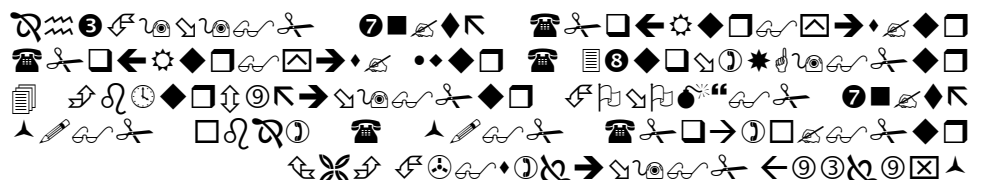
<sup>32</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Isma’il Ibn Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, Jilid 1,2, 3, (Kairah: Darul hisyam, 421-986), h. 292

spiritual. Menurut A.M. Saefuddin, islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri untuk memeratakan kesejahteraan manusia. Pertama, bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal-mengenal dan bantu-membantu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13:



Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah ialah orang yang bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui dan maha mengenal”. (Q.S Al-Hujurat:13)<sup>33</sup>

Kemudian ayat lain yang menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong adalah surat Al-Maidah ayat 2:



Artinya: ...“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S Al-Maidah: 2)<sup>34</sup>

Kedua, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara, dan selayaknya dapat merasakan penderitaan saudara yang lain. Hal ini pernah dijelaskan Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

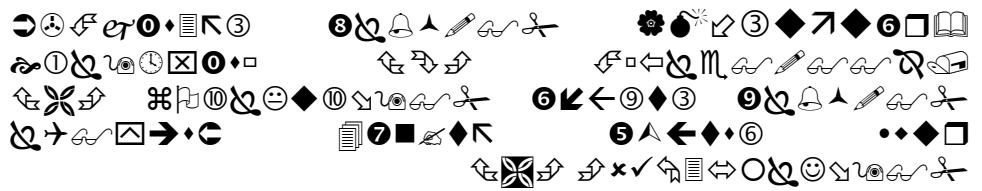
<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 412

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h 85

حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ( )

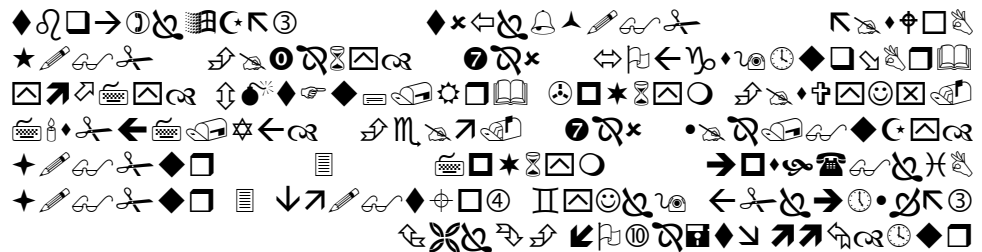
Artunya: Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir r.a, dia telah berkata: Rasulullah swa telah bersabda:s “perumpamaan orang-orang mukmin dalam hubungan kasih-sayang di antara mereka adalah seperti satu badan; apabila salah satu anggota badan merasa sakit, maka seluruh badan akan ikut merasakanya dengan rasa panas dan tidak bisa tidur”. (H.R Muslim)<sup>35</sup>

Ketiga, umat Islam diwajibkan memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang-orang yang ada dalam kesulitan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3.



Artinya: “Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin” (Q.S Al-Ma'un:1-3)<sup>36</sup>

Keempat, bahwa Islam selalu mendorong umatnya untuk selalu beramal dan bersedekah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261:



<sup>35</sup>Abu Husein Muslim Bin Hajaj Bin Muslim Al-Qusairi Annai Saburi, Syarah Ibn Nawawi, *Kitab Shahih Muslim*, Jilid 2, (Kairo: Masariyah), h. 431

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 483

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh butir: pada tiap butir tumbuhlah seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi orang yang dikehendaki-Nya. dan Allah maha luas (karunia-Nya) dan maha mengetahui” (Q.SAl-Baqarah : 261)<sup>37</sup>

Dari sini maka jelaslah bagaimana Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup secara layak sebagai manusia. Yakni hidup secara tercukupi baik kebutuhan sandang, pangan, serta papannya, demi terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

## **D. Ekonomi Kerakyatan**

### **a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan**

Dilihat dari kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini, maka diperlukan strategi dan kebijakan alternative yang berpihak kepada masyarakat miskin, *option for the poor* menjadi kebutuhan mutlak untuk menanggulangi kemiskinan. Untuk itu dibuat sebuah strategi dan kebijakan alternatif yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan iklim agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh penduduk miskin.
- b. Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 34

- c. Kebijakan dan program yang melindungi masyarakat miskin
- d. kebijakan dan program untuk penguatan otonomi Desa

Ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim di pedesaan. Ekonomi kerakyatan mengadakan perubahan penting kearah kemajuan, khususnya kearah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu bagian terbesar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan.<sup>38</sup>

Sejalan dengan arah kebijaksanaan ekonomi kerakyatan, maka kebijaksanaan pokok pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan pada upaya untuk:

- a. Meningkatkan sumberdaya manusia pengelola koperasi dan usaha kecil melalui pendidikan dan pelatihan studi banding dan magang
- b. Meningkatkan akses kepada sumber modal melalui peningkatan peran sektor jasa
- c. Peningkatan daya saing melalui kegiatan dagang, pameran informasi pasar penyediaan sarana dan prasarana usaha dan pengembangan jaringan usaha koperasi dan pengusaha kecil serta kemitraan dengan unit usaha lain
- d. Peningkatan keterampilan teknis kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga manajemen maupun instansi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi dan pengusaha kecil

---

<sup>38</sup> Sarbini, Sumawinata, *Op. Cit*, h. 161

- e. Memberikan bantuan sarana dan prasarana usaha untuk meningkatkan kegiatan usaha
- f. Meningkatkan kualitas organisasi manajemen koperasi dan usaha kecil

Sementara itu Faisal Basri dalam bukunya mengemukakan beberapa strategi pembangunan daerah yaitu:

- a. Startegi pembangunan berbasis keuntungan komperatif
- b. Pengembangan komoditi unggulan
- c. Peningkatan teknologi daerah
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- e. Pengembangan kewirausahaan daerah
- f. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu
- g. Peningkatan kerjasama antar daerah
- h. Pengembangan ekonomi kota dan daerah<sup>39</sup>

Untuk mewujudkan kedelapan strategi pembangunan daerah tersebut yang cocok adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha kecil unggul dan kompetitif. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan lapisan masyarakat dalam proses pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan.

Konsep ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah lama , namun sering kali dilupakan orang bahkan banyak tidak memhami secara tepat apa yang dimaksud dengan ekonomi rakyat dan system ekonomi

---

<sup>39</sup>Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 161

kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat yang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan secara langsung. Pengertian lain disebutkan ekonomi rakyat (perekonomian rakyat) adalah ekonomi pribumi (*people's economy is endogeneous economy*), bukan aktifitas masyarakat (*external economy*).

Ekonomi rakyat maksudnya sebagai perekonomian atau perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang berkembang relatif lambat, sesuai dengan kondisi yang melekat pada kelompok masyarakat itu.<sup>40</sup>

Konsep ekonomi rakyat sebenarnya adalah bagian besar dari cara-cara rakyat bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya, baik itu diperdangan atau kegiatan swadaya lainnya baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Ekonomi rakyat bercirikan subsisten (tradisional) dengan modal utama tenaga kerja dan modal teknologi seadanya.

Sementara itu sumodiningrat dalam bukunya mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Adapun persyaratan system ekonomi kerakyatan meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Pembangunan yang memihak rakyat yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan.

---

<sup>40</sup> Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat, Persepsi Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi di Riau*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2001), h. 2-3



- b. Pembangunan dengan azas musyawarah dan mufakat yang diwujudkan dalam bentuk dokumen pembangunan.
- c. Keterpaduan mekanisme pembangunan dengan azas keseimbangan masyarakat lokal.
- d. Koordinasi pembangunan dengan azas kebersamaan antar unsur yang terlibat dalam pembangunan secara lintas daerah.<sup>41</sup>

Konsep lain mengenai ekonomi kerakyatan adalah bahwa ekonomi kerakyatan adalah suatu upaya memberdayakan unit ekonomi yang tertinggal. Oleh karena itu pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif agar ekonomi rakyat kecil dapat berkembang, ini berarti berpihak kepada rakyat kecil.<sup>42</sup>

#### **b. Ekonomi Kerakyatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin**

Ekonomi rakyat adalah, ekonomi partisipatif yang mampu memberikan akses yang *fair* dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh input, melakukan proses produksi, distribusi dan memanfaatkan konsumsi tanpa ada hambatan untuk masuk ke pasar dengan mengorbankan fungsi sumberdaya alam sebagai alam pendukung system kehidupan masyarakat.<sup>43</sup> Ini berarti pembangunan ekonomi nasional harus benar-benar mendorong dan sekaligus menampung partisipasi dan untuk kepentingan rakyat banyak. Falsafah dalam ekonomi kerakyatan meliputi

---

<sup>41</sup>Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan pengamanan Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 70

<sup>42</sup>Ismail Nawawi, *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> Direktorat jendral bina koperasi departemen koperasi, pengusaha kecil dan menengah, *pedoman pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan*, Jakarta: 1999, h 5

pengetian bahwa kegiatan ekonomi dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>44</sup>

Sementara itu yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah, proses meningkatkan kekuasaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.<sup>45</sup> Artinya pemberdayaan masyarakat adalah strategi pembangunan yang berpusat pada kepentingan dan kebutuhan rakyat yang arahnya pada kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat harus berawal dari memberdayakan setiap rumah tangga yang mencakup:

1. Pemberdayaan social ekonomi, difokuskan pada upaya menciptakan akses bagi setiap rumah tangga dalam proses produksi, seperti akses informasi, akses terhadap pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi social, dan akses kepada sumber-sumber keuangan.
2. Pemberdayaan politik, difokuskan pada upaya menciptakan akses bagi setiap rumah tangga kedalam proses pengambilan keputusan public yang mempengaruhi masa depannya.
3. Pemberdayaan psikologis, difokuskan pada upaya pembangunan kepercayaan diri bagi setiap rumah tangga yang lemah. Kepercayaan diri pada hakikatnya merupakan hasil dari proses pemberdayaan social dan politik.

---

<sup>44</sup> *Ibid* h 7

<sup>45</sup> Djamal Doa, *Op. Cit*, h 144

Dalam hal itu ekonomi kerakyatan berusaha untuk memberdayakan masyarakat miskin agar mendapat penghidupan yang layak. Pemberdayaan masyarakat adalah strategi pembangunan yang berpusat pada kepentingan dan kebutuhan rakyat yang arahnya pada kemandirian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada dasarnya merupakan manifestasi dari pembangunan ekonomi yang berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi yang universal yaitu menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan dengan otonomi sebagai titik tolaknya.<sup>46</sup>

Ada beberapa program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan:

1. Program pembinaan koperasi
2. Program fasilitas pembiayaan
3. Program pengembangan PKM (pengusaha kecil dan menengah)

Langkah-langkah strategis yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah:

1. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani, dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
2. Melakukan program pembinaan yang kontiniu terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendampingn
3. Melaksanakan program pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka saat meembangkan usaha

---

<sup>46</sup>Faisal Basri, "Perekonomian Indonesia", (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 219

4. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodik antarintansi yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.<sup>47</sup>

Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam bentuk program UP2K (Upaya Peningkatan Penadpatan Keluarga) adalah bagian dari gerakan pembarentasan kemiskinan dan pengangguran, dimana merupakan strategi pemerataan pembangunan di daerah, dan upaya konkrit dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan pada masa otonomi daerah.

Hal ini dibuat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No: Kpts.2999.a/VIII/2007, menimbang bahwa pelaksanaan penyaluran dana program Penguatan Modal Usaha Bagi Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan atau disebut program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) perlu ditetapkan nama-nama penerima Program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Pedesaan Provinsi Riau tahun 2007.<sup>48</sup>

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut diatas perlu menetapkan nama-nama kelompok UP2K penerima bantuan penguatan modal usaha di Pedesaan se-Provinsi Riau tahun 2007 dan juga menurut undang-undang yang telah ditetapkan maka memutuskan penetapan nama-nama kelompok UP2K penerima bantuan penguatan modal usaha di pedesaan tahun anggaran 2007, sebagaimana telah tercantum dalam arsip

---

<sup>47</sup> Zulkarnain, *Op. Cit*, h. 14

<sup>48</sup> Dokumen Kecamatan pangkalan Kuras

badan Pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat Provinsi Riau yang didapat di setiap desa se Provinsi Riau. Dan segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Riau pada DPA-SKPD tahun anggaran 2007 melalui Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau.<sup>49</sup>

Kegiatan program ini bertujuan untuk memutar roda usaha rakyat secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pemberian bantuan penguatan modal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya akan mampu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga dapat memutar roda perekonomian lebih baik dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak yang diharapkan dari program ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan mengurangi angka pengangguran. Hal ini diharapkan dapat tercapai dalam 4 jalur yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM
2. Pengembangan pemodalan
3. Pengembangan peluang kerja dan beruaha
4. Penguatan kelembagaan kelompok penduduk miskin<sup>50</sup>

Peningkatan SDM serta kemampuan pemodalan dalam kelembagaan kelompok yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penduduk miskin, diharapkan akan dapat memperkuat

---

<sup>49</sup>*Ibid*

<sup>50</sup>*Ibid*

kemampuan mereka untuk menganggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**BAB IV**  
**DAMPAK PROGRAM UP2K (UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN**  
**KELUARGA) TERHADAP PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN**  
**MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN DITINJAU**  
**MENURUT EKONOMI ISLAM**

**A. Kondisi Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan**

Disamping untuk menciptakan masyarakat yang handal dalam berusaha, meningkatkan jumlah pendapatan dan kesejahteraan merupakan tujuan utama di canangkannya program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan keluarga) ini. Hal ini sesuai dengan arah pembangunan yakni mengurangi jumlah pengangguran dan juga jumlah kemiskinan. Karena salah satu indicator masyarakat dikatakan miskin adalah jika jumlah pendapatan hanya cukup memenuhi 2100 kalori/hari plus kebutuhan lain seperti rumah, dan kondisi ini akan menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi tidak sejahtera. Maka meningkatkan jumlah pendapatan dan kesejahteraan merupakan langkah yang tepat dalam hal menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan bantuan UP2K, yang menjadi sasaran utama program ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan yang ingin atau sedang mengembangkan usaha akan tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membuka atau mengembangkan usahanya. Untuk mengetahui apakah program UP2K ini berdampak baik atau buruk bagi masyarakat penerima bantuan, maka yang perlu kita ketahui adalah kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan.

**a. Kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebelum menerima bantuan**

Jumlah pendapatan yang diterima seseorang merupakan salah satu tolak ukur yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang. Semakin besar jumlah pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian semakin besar kemungkinan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, maka semakin sejahtera juga kehidupan seseorang. Karena sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yang dimaksud sejahtera adalah kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.

Dari angket yang telah disebarkan kepada responden ada berbagai tanggapan responden mengenai jumlah pendapatan yang mereka peroleh yang akhirnya akan dapat menjawab apakah mereka sudah hidup sejahtera atau belum. Adapun tanggapan responden antara lain adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai jenis usaha yang ditekuninya/ dijalankannya.



**TABEL IV. 1**  
**JENIS USAHA YANG DITEKUNI/DIJALANKAN**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Perdagangan	34	50%
2.	Industry kecil/industry rumah tangga	17	25%
3.	Jasa	9	13.23%
4.	Pertanian	8	11.76%
	Jumlah	68	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa setengah dari reponden dalam penelitian ini menekuni usaha dibidang perdagangan yaitu berjumlah 34 orang atau sama dengan 50% bila dipersentasekan. Dan untuk responden yang berusaha dibidang industri yaitu industri kecil/industri rumah tangga adalah berjumlah 17 orang dari total responden yang ada atau bila dipersentasekan sama dengan 25%. Sementara responden yang menjalankan usaha dibidang jasa adalah berjumlah 9 orang atau sama dengan 13.23%. Dan jumlah responden yang menjalankan usaha pertanian hanya berjumlah 8 orang atau sama dengan 11.76%

Dari tabel diatas dapat juga ditarik kesimpulan bahwa jenis usaha, yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat penerima bantuan adalah berdagang, mungkin ini disebabkan sebagian besar responden hanya memiliki kemampuan dalam bedagang.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai lamanya usaha dijalankan dapat kita lihat pada tabel berikut:

**TABEL IV. 2**  
**LAMANYA USAHA DITEKUNI/DIJALANKAN**

No	Alternatife Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	< 1 tahun – 1 tahun	18	26.47%
2.	2 – 5 tahun	41	60.29%
3.	> 5 tahun	9	13.23%
	<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lamanya responden menjalankan usahanya berbeda-beda. Responden yang menjalankan usahanya selama < 1 tahun – 1 tahun adalah 18 orang atau sama dengan 26.47%. Dan responden yang menjalankan usaha selama 2-5 tahun adalah berjumlah 41 orang atau sama dengan 60.29%. Dan responden yang menjalankan usaha selama > 5 tahun adalah berjumlah 9 orang atau sama dengan 13.23%.

Untuk mengetahui berapa besarnya modal sebelum memperoleh dana bantuan program UP2K maka dapat kita lihat pada tabel berikut:

**TABEL IV. 3**  
**JUMLAH MODAL MEREKA SEBELUM MENDAPAT BANTUAN PROGRAM UP2K**

No	Alternatife Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	< 1.000.000 – 1.500.000	54	79.41%
2.	2.000.000 – 5.000.000	11	16.17%
3.	> 5.000.000	3	4.41%
	<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya modal responden sebelum menerima bantuan program UP2K bervariasi. Mulai dari < 1.000.000 – 1.500.000 sampai > 5.000.000. adapun jumlah responden yang memiliki modal <1.000.000 – 1.000.000 adalah 54 orang atau sama dengan

79.41%. Dan responden yang memiliki modal 2.000.000 -5.000.000 adalah 11 orang atau sama dengan 16.17%. sementara itu jumlah reponden yang memiliki modal > 5.000.000 adalah 3 orang atau sama dengan 4.41%.

Dari data di atas dapat juga diketahui bahwa mayoritas responden memiliki modal yang kecil sehingga adanya bantuan ini merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui berapa besarnya jumlah pendapatan responden sebelum mendapat bantuan program UP2K maka dapat kita lihat dari tabel di bawah ini:

**TABEL IV. 4**  
**JUMLAH PENDAPATAN MEREKA SEBELUM MENDAPAT BANTUAN**  
**PROGRAM UP2K**

No	Alternatife Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	< Rp500.0000	28	41.17%
2.	Rp500.000 – 1.499.000	30	44.11%
3.	Rp1.500.000 – Rp2.499.000	8	11.76%
4.	Rp2.500.000 – Rp3.499.000	2	2.49%
5.	>Rp3.500.000	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah reponden yang berpendapatan <Rp500.000 adalah 28 orang atau sama dengan 41.17%. Dan jumlah reponden yang berpendapatan Rp 500.000 – 1.499.000 adalah 30 orang atau sama dengan 44.11%. Kemudian jumlah responden yang berpendapatan Rp 1.500.000 – 2.499.000 adalah 8 orang atau sama dengan 11.76%. Sementara itu jumlah responden yang berpendapatan Rp 2.500.000

– 3.000.000 adalah 2 orang atau sama dengan 2,49% dan jumlah responden yang berpendapatan Rp> 3.500.000 adalah 0 orang atau sama dengan 0%.

Dari data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan begitu memprihatinkan. Bagaimana tidak, sebagaimana yang dipaparkan di atas bahwa sebanyak 30 orang responden hanya berpenghasilan 500.000 – 1.499.000, dan yang lebih memprihatinkan lagi sebanyak 28 orang responden hanya berpenghasilan <500.000. jumlah pendapatan ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk pangan, sandang, dan papan. Selain itu juga digunakan untuk pendidikan anak sekolah. Sementara dari data yang diperoleh sebanyak 51 orang responden memiliki tanggungan 3 – 5 orang. Sehingga jumlah pendapatan yang diterima nyaris tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kesimpulannya masyarakat penerima bantuan belumlah hidup sejahtera.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah seorang responden, yakni bu Ros beliau menyatakan bahwa sebelum memperoleh bantuan program UP2K sumber penghasilan keluarganya hanya bertumpu pada suaminya saja. Dengan penghasilan berkisar 1.000.000 – 1.500.000 (tidak tetap) per bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya anak-anak sekolah sebanyak 5 orang, kebutuhan keluarga nyaris tidak mencukupi. Akan tetapi setelah memperoleh bantuan program UP2K bu Ros sekarang dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Bur Ros, Responden Penerima Bantuan UP2K, Wawancara, Tgl 25 Maret 2011, Jumat.

Dengan adanya program bantuan UP2K ini diharapkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan akan dapat meningkat. Maka untuk mengetahui bagaimana dampaknya dapat kita lihat pada pembahasan berikut.

**b. Kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sesudah menerima bantuan**

Dampak yang diharapkan Pemerintah dengan dicanagkannya program UP2K ini adalah, diharapkan masyarakat penerima bantuan akan dapat meningkatkan pendatan dan kesejahteraan mereka. Untuk mengetahui bagaimana dampak peogram UP2K di Kecamatan Pangkalan Kuras, maka dapat kita lihat berdasarkan angket yang telah disebar pada responden dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui bagaimana dampaknya, maka kita lihat dulu berapa besar modal yang dimiliki responden setelah mendapat bantuan program UP2K ini. Maka untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**TABEL IV. 5  
JUMLAH MODAL MEREKA SETELAH MENDAPAT BANTUAN  
PROGRAM UP2K**

No	Alternatife Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Rp1.000.000 – Rp2.000.000	43	63.23%
2.	Rp3.000.000 – Rp4.000.000	20	29.41%
3.	>Rp5.000.000	5	7.35%
	Jumlah	68	100%

Sumber: Data olahan

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah responden yang memiliki modal Rp1.000.000 – Rp2.000.000 adalah 43 orang atau sama dengan 63.23%. Sementara jumlah responden yang memiliki modal Rp3.000.000 – Rp4.000.000 adalah 20 orang atau sama dengan 29.41%. Dan jumlah responden yang memiliki modal Rp>5.000.000 adalah 5 orang atau sama dengan 7.35%.

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian jumlah modal responden mengalami peningkatan sehingga dapat membantu mengembangkan usaha mereka.

Dengan bertambahnya modal yang dimiliki oleh masing-masing responden, tentunya akan terjadi perubahan dalam usaha yang dijalankan. Maksudnya, dengan penambahan modal tersebut maka usaha yang dijalankan oleh responden juga akan berkembang. Untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh responden tersebut berkembang atau tidak, maka dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL IV. 6**  
**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PERKEMBANGAN USAHA**  
**MEREKA SETELAH MENDAPAT BANTUAN PROGRAM UP2K**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Berkembang	54	79.41%
2.	Tidak Berkembang	5	7.35%
3.	Biasa-biasa saja	9	13.23%
	Jumlah	68	100%

Sumber: Data olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar usaha responden mengalami perkembangan, yaitu 54 orang responden atau

79.41% menyatakan mengalami perkembangan dalam menjalankan usahanya setelah memperoleh bantuan program UP2K ini. Dan 5 orang atau sama dengan 7.35% responden menyatakan usaha yang dijalankan tidak berkembang. Sementara itu 9 orang atau sama dengan 13.23% responden menyatakan usaha yang dijalanannya biasa-biasa saja.

Sebagaimana data dari tabel di atas terlihat dari 68 jumlah responden terdapat 5 orang responden yang menyatakan bahwa usaha yang dijalankan tidak berkembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden yakni Ibu Sumiati (38Thn), beliau menyatakan bahwa usahanya tidak berkembang karena dana yang diberikan tidak digunakan untuk mengembangkan usahanya melainkan untuk kebutuhan sehari-hari yang saat itu memang mendesak.<sup>2</sup>

Kemudian melihat fenomena perkembangan usaha reponden diatas, maka tentunya pendapatan responden juga mestinya pendapatan responden juga ikut bertambah. Untuk melihat perubahan dalam jumlah pendapatan responden, maka dapat kita lihat pada tabel berikut:

**TABEL IV. 7**  
**JUMLAH PENDAPATAN MEREKA SETELAH MENDAPAT BANTUAN**  
**PROGRAM UP2K**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	< Rp500.0000	3	4.41%
2.	Rp500.000 – 1.499.000	55	80.88%
3.	Rp1.500.000 – Rp2.499.000	5	7.35%
4.	Rp2.500.000 – Rp3.499.000	2	2.94%
5.	>Rp3.500.000	3	4.41%
	<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data olahan

<sup>2</sup>Ibu Sumiati, Responden Penerima Banantuan, Wawancara, Tgl 12 April 2011, Selasa.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berpendapatan <Rp500.000 adalah 3 orang atau sama dengan 4.41%. Dan jumlah reponden yang berpendapatan Rp 500.000 – 1.499.000 adalah 55 orang atau sama dengan 80.88%. Kemudian jumlah responden yang berpendapatan Rp 1.500.000 – 2.499.000 adalah 5 orang atau sama dengan 7.35%. Sementara itu jumlah responden yang berpendapatan Rp 2.500.000 – 3.000.000 adalah 2 orang atau sama dengan 2.49% dan jumlah responden yang berpendapatan Rp> 3.500.000 adalah 3 orang atau sama dengan 4.41%.

Dari data di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa sebagian besar jumlah pendapatan responden mengalami peningkatan. Meskipun peningktan tersebut tidak begitu signifikan, akan tetapi bila dilakukan secara terus-menerus akan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Dengan meningkatnya pendapatan maka akses untuk memenuhi kebutuhan juga akan meningkat, maka dengan demikian kesejahteraan juga akan ikut mingkat. Dengan demikian berarti dengan adanya program bantuan UP2K (Upaya Peningkatan pendapatan keluarga) ini memberikan dampak baik terhadap masyarakat penerima bantuan.

#### **B. Pelaksanaan UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan keluarga) di Kecamatan Pangkalan Kuras**

Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu program adalah pelaksanaanya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran maka program itu akan dapat memberikan dampak bagi masyarakat.



Adapun pelaksanaan program UP2K di Kecamatan Pangkalan Kuras dimulai sejak tahun 2008 berdasarkan keputusan Gubernur Riau No: Kpts.2999.a/VIII/2007, akan tetapi karena beberapa kendala program UP2K tersebut tidak berkembang. Diantara kendalanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan program tersebut. Kemudian pada tahun 2009 barulah program ini dikembangkan lagi.

#### **a. Status dan Mekanisme Pengelolaan Dana**

##### **1. Status Dana**

Dana program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan keluarga) bagi pembangunan perempuan di pedesaan bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi. Dana ini kemudian dikelola oleh tim penggerak PKK desa/kelurahan yang di gulirkan kepada kelompok-kelompok UP2K di desa/kelurahan yang yang bersangkutan. Untuk satu Tahun dana disalurkan ke masing-masing kelompok sesuai dengan usulan yang diajukan oleh TP PKK desa/kelurahan melalui Kantor/badan/Dinas PMD Kabupaten/Kota atau sebutan lain yang sudah disahkan dengan surat keputusan Gubernur Riau. Selanjutnya pada tahun berikut tetap dikelola oleh TP PKK desa/kelurahan dan digulirkan kepada kelompok lain di dalam desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah 10.000.000 per kelompok UP2K desa/kelurahan. Kemudian besarnya jasa pinjaman yang dibebankan

kepada anggota sesuai dengan kesepakatan kelompok UP2K desa/kelurahan yang digunakan untuk biaya operasional pengelola dana.

## 2. Mekanisme Pencairan Dana

- 1) Ketua tim penggerak PKK Kabupaten/Kota agar membuka rekening di salah satu unit BRI terdekat dengan specimen tanda tangan oleh ketua TP PKK Kabupaten/Kota
- 2) Pemerintah Provinsi Riau, melalui kas daerah mentransfer dana bantuan ke rekening Ketua Tim penggerak PKK kabupaten/Kota

## 3. Mekanisme Penyaluran Dana

Setelah diterima melalui rekening dan dicairkan oleh ketua PKK Kabupaten/Kota, maka dana tersebut langsung disalurkan kepada ketua kelompok-kelompok UP2K penerimaan bantuan dari Desa, Kelurahan yang tercantum dalam SK Gubernur Riau dengan mempergunakan format yang sudah disediakan.

Kemudian ketua kelompok akan menyalurkan dana tersebut kepada kelompoknya sesuai kesepakatan. Apakah dana tersebut dikelola bersama atau ingin dibaigan dan dikelola masing-masing sesuai pada bidang usaha yang dijlankan.

Tidak adanya pengontrolan secara langsung dari pihak kecamatan ini mengakibatkan terkadang dana tersebut disalahgunakan. Misalnya saja di Desa Sorek Dua, dana UP2K tidak berkembang karena dana tersebut hanya digunakan oleh ketua UP2K

saja. Ketua UP2K tidak menyalurkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Selain itu desa yang juga tidak menjalankan program UP2K sesuai dengan ketentuan yang telah diatur adalah Desa Dundangan, dimana di desa ini dana UP2K hanya dimanfaatkan oleh beberapa orang yang dekat dengan ketua UP2K, sementara orang yang membutuhkan tidak diberi kesempatan untuk memperoleh dana bantuan tersebut. Namun meskipun demikian pengurus UP2K ditingkat desa tetap melaporkan dana tersebut dalam keadaan berkembang.

#### 4. Mekanisme Pengembalian Dana

Pengembalian dana dimulai pada bulan ke-4 (empat) sejak bantuan danan tersebut diterima oleh masing-masing kelompok UP2K di Desa/kelurahan. Akan tetapi dana tersebut tidak lagi dikembalikan kepada Kecamatan, melainkan dikelola terus menerus oleh pengurus desa untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengurus-pengurus UP2K desa hanya memberikan laporan mengenai perkembangan UP2K di desanya kepada pihak kecamatan. Pihak kecamatan hanya mengontrol perkembangan UP2K di desa-desa melalui laporan yang diberikan oleh ketua-ketua UP2K ditingkat desa.

Misalnya seperti di Desa Harapan Jaya, mulanya pada Desa ini hanya terdapat 1 kelompok. Akan tetapi karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan maka dibentuk lagi 2 kelompok hingga saat ini jumlah kelompok UP2K di Desa ini telah berjumlah 3

kelompok yang diberi nama kelompok UP2K melati, mawar, dan nusa indah. Jumlah anggota kelompoknya masing-masing adalah 10 orang. Dana tersebut kemudian disalurkan oleh ketua UP2K dengan cara simpan pinjam (atas kesepakatan anggota). Jadi masing-masing anggota berhak memperoleh pinjaman sebesar Rp1.000.000,- dalam jangka satu tahun. Adapun jumlah imbalan jasa yang diberikan sesuai kesepakatan para anggota. Jadi kalau anggota meminjam sebesar Rp1.000.000,- setiap bulannya mereka akan membayar 100.000 selama satu tahun, yang didalamnya mencakup biaya administrasi sebesar Rp5.000,- tabungan sebesar Rp10.000,- dan angsuran utang sebesar Rp85.000,-. Kemudian tabungan ini nantinya akan dibagikan lagi kepada anggota, tujuannya adalah agar program UP2K ini benar-benar dapat menjadikan masyarakat lebih kuat dalam modal dan usaha.

Menurut penuturan ketua UP2K Desa Harapan Jaya, biaya administrasi tersebut digunakan untuk biaya konsumsi dan biaya tak terduga lainnya pada saat arisan UP2K. Jadi sebulan sekali mereka akan melaksanakan arisan untuk mengumpulkan anggota UP2K agar pembayaran angsuran lebih mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua UP2K di desa-desa, bahwa tidak ada masalah dalam pengembalian ini. Misalnya saja seperti penuturan Ibu Yuli ketua UP2K desa Harapan Jaya, menyatakan bahwa sejauh ini dalam proses pengembalian dana UP2K

tidak ada masalah, karena dalam proses pengembalian dana belum pernah terjadi kemacetan pembayaran dari masyarakat penerima bantuan.<sup>3</sup>

Adapaun nama-nama kelompok UP2K yang terdapat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten pelalawan dapat kita lihat pada tabel berikut:

**TABEL IV. 8**  
**JUMLAH KELOMPOK PENERIMA BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA DAN JENIS USAHA BAGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PROGRAM UP2K KECAMATAN PANGKALAN KURAS.**

No	Desa/Kelurahan	Nama Kelompok	Anggota	Jenis Uasah
1	Sorek Satu	Sorek Satu	10 orang	Kerajinan (anyaman, bunga)
		Bidadari	10 orang	Simpan Pinjam.
2	Sorek Dua	Sorek Dua	10 orang	Perikanan
3	Dundangan	Sari madu dundangan	5 orang	Simpan Pinjam.
4	Palas	Melati	5 orang	Simpan Pinjam.
5	Kemang	Kemang	10 orang	Simpan Pinjam.
6	Sialang Indah	Primadona	14 orang	Simpan Pinjam.
		Wijaya Kusuma	14 orang	Simpan Pinjam.
7	Surya Indah	Surya indah	5 orang	Simpan Pinjam.
8	Harapan Jaya	Melati	10 orang	Simpan Pinjam
		Mawar	10 orang	Simpan Pinjam.
		Nusa Indah	10 orang	Simpan Pinjam.
9	Betung	Betung	5 orang	Simpan Pinjam.
10	Talau	Melati	17 orang	Simpan Pinjam.
	Jumlah	15 kelompok	135orang	

Sumber: PKK Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2011

Dari tabel di atas dapat kita ketahui jumlah kelompok UP2K di Kecamatan Pangkalan Kuras. Dan dari kelompok msasyarakat penerima

<sup>3</sup>Ibu Ita, *Wawancara*, Harapan Jaya, hari senin, Tgl 28 Maret 2011.

bantuan tersebut, dapat diketahui pula bahwa jumlah kelompok UP2K terbanyak adalah Desa Harapan Jaya. Dan juga dapat diketahui bahwa jenis usaha yang paling banyak adalah simpan pinjam. Ini dikarenakan kebanyakan dari anggota kelompok UP2K ingin membuka usaha sendiri, dan mengelola usaha sendiri sesuai kemampuan anggota tersebut.

Sejalan dengan pelaksanaan program UP2K diatas maka ternyata terjadi penurunan jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Pangkalan Kuras. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

**TABEL IV. 9**  
**JUMLAH RUMAH TANGGA DAN RUMAH TANGGA MISKIN TIAP**  
**DESA DAN KELURAHAN YANG MENERIMA BANTUAN PROGRAM**  
**UP2K DI KECAMATAN PANGKALAN KURAS PADA TAHUN 2009 DAN**  
**2010**

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga Miskin	
		2009	2010
1.	Sorek Satu	411	206
2.	Sorek Dua	167	77
3.	Dundangan	112	58
4.	Palas	64	46
5.	Kemang	69	54
6.	Betung	90	40
7.	Talau	51	40
8.	Surya indah	260	53
9.	Sialang Indah	131	53
10.	Harapan Jaya	32	25
	<b>Jumlah</b>	<b>1.319</b>	<b>652</b>

Sumber : Monografi Kecamatan Pangkalan Kuras

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah rumah tangga miskin yang menerima bantuan penguatan modal dalam program usaha peningkatan pendapatan keluarga di Kecamatan Pangkalan Kuras pada tahun 2009, dimana rumah tangga miskin terbanyak terdapat di Kelurahan Sorek Satu

yaitu berjumlah 411 Rumah tangga miskin atau keluarga Miskin. Dan Desa yang memiliki Rumah tangga miskin adalah Harapan Jaya yaitu berjumlah 32 Ruamah tangga miskin atau keluarga miskin.

Dari perkembangan jumlah rumah tangga miskin ditahun 2010, maka dapat membandingkan adanya penurunan jumlah rumah tangga miskin di 10 desa yang mendapat bantuan penguatan modal di Kecamatan Pangkalan Kuras dari tahun 2009 yang berjumlah 1.319 rumah tangga miskin mengalami penurunan menjadi 652 ditahun 2010.

Seperti yang dituturkan oleh ketua PKK Desa Talau yakni Ibu Neti, bahwa denagn adanya program bantuan UP2K ini cukup membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan, kemudian menurutnya UP2k ini sesuai dengan keadaan masyarakat desa. Dimana dalam masyarakat desa banyak terdapat ibu-ibu yang menganggur, karena tidak mempunyai keahlian dan modal. Akan tetapi dengan adanya program ini selain dananya mudah diperoleh juga sesuai dengan kondisi masyarakat desa.<sup>4</sup>

#### **b. Mekanisme Penentuan Kelompok-kelompok UP2K**

Sebagaiman telah kita ketahui, bahwa sasaran dari program UP2K ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan ingin membuka atau mengembangkan usaha akan tetapi tidak mempunyai modal yang cukup. Maka, program ini akan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat penerima bantuan apabila bantuan program UP2K ini diberikan tepat pada sasaran. Untuk melihat apakah bantuan ini telah tepat

---

<sup>4</sup>Ibu Neti, *Wawancara*, Talau, Hari selasa, Tgl 29 Maret 2011.

sasaran maka kita perlu mengetahui kepada siapa bantuan ini telah diberikan. seperti penuturan salah satu penerima bantuan, bahwa sejauh ini pelaksanaan program UP2K di kecamatan pangkalan Kuras sudah tepat sasaran, karena dana program ini diberikan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan minim modal tanpa membedakan agama, umur, dan pendidikan<sup>5</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**TABEL IV. 10**  
**KELOMPOK USIA RESPONDEN PENERIMA BANTUAN**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	20 – 30 tahun	16	23.52%
2.	35 – 40 tahun	23	33.82%
3.	45 – 50 tahun	22	32.35%
4.	55 – 60 tahun	7	10.29%
5.	> 65 tahun	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan

Dari analisa diatas dapat dilihat bahwa reponden yang berusia 20-30 tahun adalah 16 atau bila dipersentasekan sama dengan 23.52%. dan responden yang berusia 35-40 tahun merupakan responden terbanyak yaitu berjumlah 23 orang atau bila dipersentasekan sama dengan 33.82%. sementara responden yang berusia 45-50 tahun juga merupakan responden no dua terbanyak yaitu berjumlah 22 orang atau bila dipersentasekan sama dengan 32.35%. dan jumlah responden yang berusia 55-60 tahun adalah responden paling sedikit yaitu berjumlah 7 orang atau bila dipersentasekan sama dengan 10.29%. Berdasarkan data di atas, dapat juga diketahui

---

<sup>5</sup>Ibu Erni, *Wawancara*, Kemang, Hari Minggu, Tgl 3 April 2011



bahwa semua responden yang menerima dana bantuan adalah dalam usia produktif.

Kemudian untuk mengetahui agama apa saja yang dianit oleh responden dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL IV. 11**  
**AGAMA YANG DIANUT RESPONDEN PENERIMA BANTUAN**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Islam	66	97.05%
2.	Kristen	2	2.94%
3.	Budha	-	-
4.	Hindu	-	-
	Jumlah	68	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa jumlah responden yang beragama Islam berjumlah 66 orang atau sama dengan 97.05%. Dan responden yang beragama Kristen berjumlah 2 orang atau sama dengan 2.94%. Sementara itu responden yang beragama Budha adalah 0% begitu juga responden yang beragama Hindu. Dari sini dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah beragama Islam.

Dari tabel di atas dapat pula disimpulkan, bahwa dalam pelaksanaan program UP2K tidak membedakan responden apakah dia beragama Islam, Kristen, Hindu, maupun Budha.

Kemiskinan bukan hanya disebabkan sedikitnya seseorang memiliki harta, atau sedikitnya jumlah pendapatan yang diperoleh. Akan tetapi tingkat pendidikan seseorang juga bisa menjadi salah satu penyebab

seseorang terjebak dalam kemiskinan. Maka untuk melihat tingkat pendidikan responden dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL IV. 12**

**TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN PENERIMA BANTUAN**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Tidak sekolah	1	1.47%
2.	SD	50	73.52%
3.	SLTP sederajat	11	16.17%
4.	SLTA sederajat	6	8.82%
5.	S1 (strata satu)		
	Jumlah	68	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pendidikan responden adalah tamat SD (sekolah dasar) yaitu berjumlah 50 orang atau bila dipersentasekan sama dengan 73.52%, dan responden yang tamat SLTP sederajat adalah berjumlah 11 orang atau bila dipersentasekan sama dengan 16.17%. kemudian responden yang tamat SLTA sederajat adalah 6 orang atau sama dengan 8.82%. Dan jumlah responden yang tidak sekolah adalah 1 orang. Sementara itu responden yang tam S1 adalah 0%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah mereka yang hanya tamat SD, ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan seseorang juga merupakan salah satu tolak ukur kemampuan seseorang dalam memajemen keuangan dan melihat peluang usaha dan bisnis untuk meningkatkan pendapatan keluarganya.

Untuk mengetahui berapa jumlah tanggungan responden, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL IV. 13**  
**JUMLAH ANGGOTA KELUARGA YANG MASIH DALAM TANGGUNG**  
**RESPONDEN PENERIMA BANTUAN**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	0-2 orang	11	16.17%
2.	3-5 orang	51	75%
3.	6-8 orang	6	8.82%
4.	9-10 orang	-	-
5.	> 12	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki tanggungan 0-2 adalah 11 orang atau sama dengan 16.17%. dan responden yang memiliki tanggungan 3-5 orang adalah 51 orang atau sama dengan 75%, sementara itu responden yang memiliki tanggungan 6-8 orang adalah berjumlah 6 orang atau sama dengan 8.82% dan responden yang memiliki tanggungan 9-10 orang dan >12 orang adalah berjumlah 0 orang atau sama dengan 0%.

Dari beberapa data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran dana program UP2K di Kecamatan Pangkalan Kuras telah tepat sasaran. Karena seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa responden berasal dari masyarakat yang berpendidikan rendah dan memiliki banyak tanggungan, sementara pendapatan yang diperoleh tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Inilah tanggapan responden mengenai pelaksanaan program UP2K di Kecamatan Pangkalan Kuras, untuk lebih jelas dapat kita lihat pada tabel berikut :

**TABEL IV. 14**  
**TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PROGRAM UP2K DI**  
**KECAMATAN PANGKALAN KURAS APAKAH SUDAH SESUAI**  
**DENGAN SYRI'AT ISLAM ATAU BELUM**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Sudah	66	97.05%
2.	Belum	-	-
3.	Tidak Tahu	2	2.94%
	Jumlah	68	100%

Sumber: Data olahan

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa 66 orang responden menyatakan bahwa program UP2K telah sesuai dengan syari'at Islam atau bila dipersentasekan sama dengan 97.05%. kemudian sebanyak 2 orang responden menyatakan tidak tahu atau bila dipersentasekan sama dengan 2.94% . Ini dikarenakan mereka beragama bukan Islam sehingga mereka tidak mengetahui apakah sudah sesuai atau belum. Dan responden yang menyatakan belum sesuai adalah 0 orang atau sama dengan 0%.

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga)**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Pada umumnya kemiskinan terjadi akibat tidak meratanya distribusi pendapatan pada seluruh lapisan masyarakat. Kemiskinan ini bila dibiarkan terus menerus akan dapat menghambat pembangunan suatu Negara, selain itu hal yang lebih penting adalah kemiskinan ini dapat menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi tidak sejahtera.

Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting, untuk turut campur dalam pemerataan pendapatan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan apakah tinggal di kota ataupun di desa. Pencanaan program bantuan seperti UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) merupakan salah satu cara yang tepat dalam hal pemerataan pendapatan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis maupun transaksi, Islam memiliki nilai-nilai dan prinsip syariah yang bersumber dari A-Qur'an dan Hadis. System ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan system syari'ah yang memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral islam
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan social yang solid berdasarkan system ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
4. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial<sup>6</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam pemberian bantuan seperti UP2K ini sama dengan *Qardhul hasan*. Adapun yang dimaksud dengan *Qardhul hasan* adalah, pemberian pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutang).<sup>7</sup> Pinjaman *qardh* bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan *financial*. Biaya administrasi yang dibebankanpun dengan jumlah yang terbatas, kemudian cara

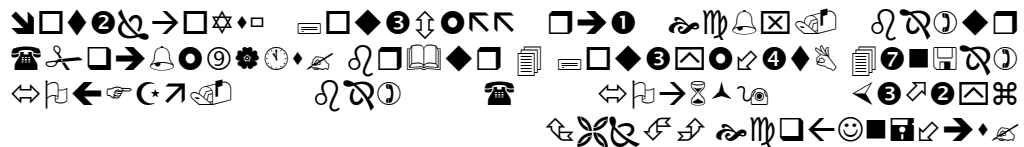
---

<sup>6</sup>Suhrawardi Kalubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 3

<sup>7</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 247

pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan syari'ah Islam (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun bila si peminjam ingin memberikan kelebihan atas uang pinjamannya maka diperbolehkan. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 280:

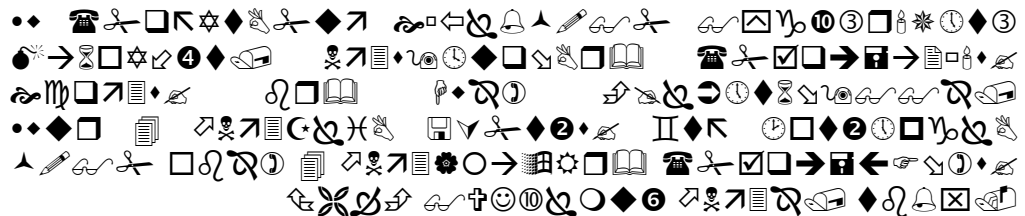


Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (Q. S. 2: 280)<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa dampak yang diberikan oleh UP2K ini dibenarkan dalam Islam, karena dengan adanya program UP2K ini pemerataan dalam hal distribusi pendapatan dan kesejahteraan dapat tercapai. Kemudian ini didukung dengan pelaksanaan yang transparan, prosedurnya mudah serta tidak dibebankan bunga sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini. Pelaksanaan program UP2K di Kecamatan Pangkalan Kuras belum secara umum sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Maksudnya bila di tinjau dari pengembalian dana program UP2K tidak ada unsur riba, karena meskipun dalam pengembalian terdapat tambahan dari pinjaman, akan tetapi sebelumnya telah disepakati

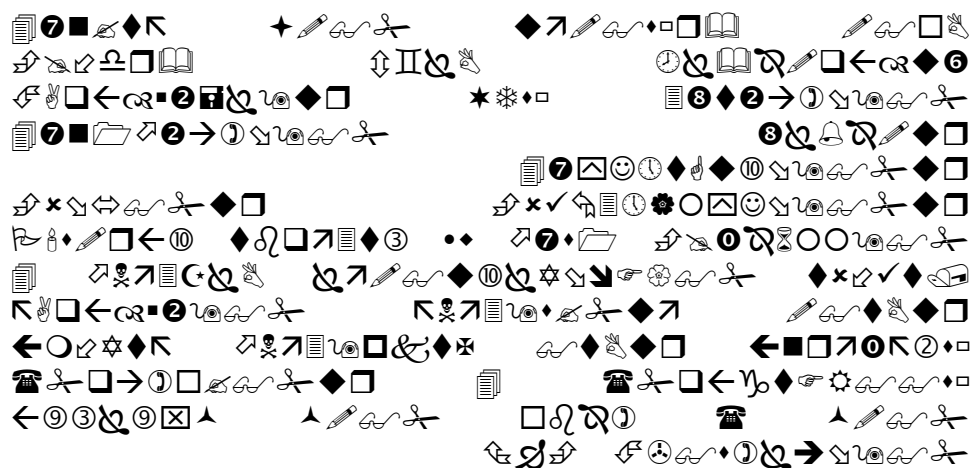
<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV. Diponegoro IKAPI, 2005), h. 37

dalam akad diawal. Oleh karena maka hal ini tidak termasuk riba, hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. 4:29)<sup>9</sup>

Dalam ayat di atas Allah menegaskan bahwa segala sesuatu yang didasari suka sama suka (*antaradin minkum*) tidaklah termasuk riba. Adapun landasan hukum yang mebolehkan pemberian bantuan kepada kaum yang kurang mampu (miskin) terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist antara lain adalah sebagai berikut, Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7:

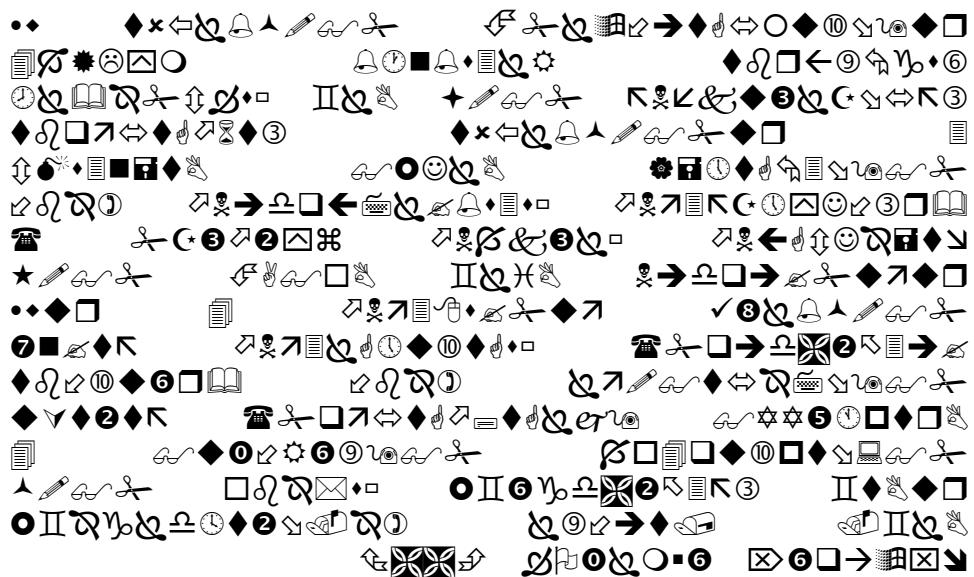


Artinya: “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk

<sup>9</sup> Ibid, h. 65

kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.(Q. S.59:7)<sup>10</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Islam tidak saja menuntut pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap orang, melainkan juga menekankan adanya suatu distribusi pendapatan yang merata sedemikian rupa sehingga setiap manusia dapat merasakan hidup yang layak dan sejahtera. Kemudian ayat lain yang menegaskan bahwa pentingnya distribusi pendapatan adalah Al-Qur’an surat Al-Nur ayat 33:



Artinya:” Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta

<sup>10</sup>Ibid, h. 436

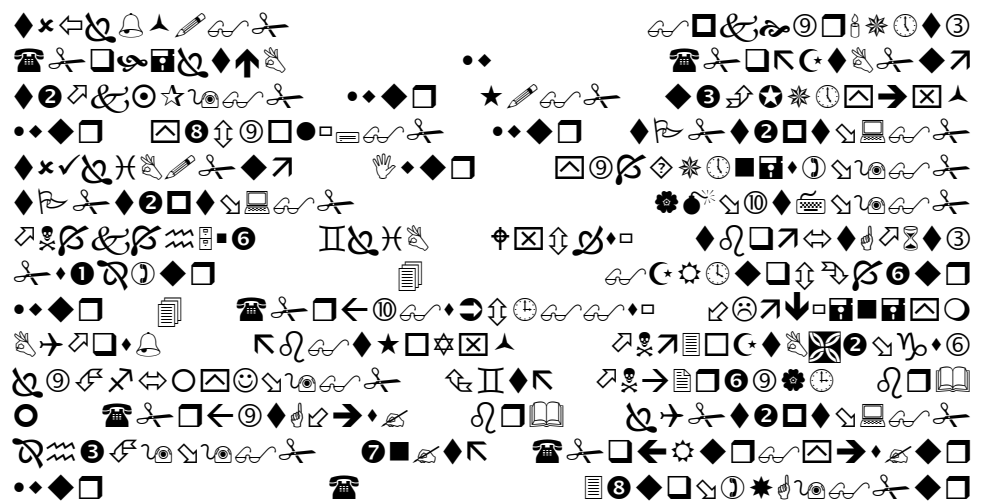


Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.(Q. S. 24 :33)<sup>11</sup>

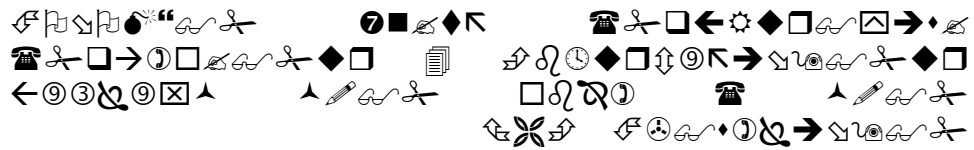
Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa harta dan kesejahteraan itu milik Allah sehingga manusia menguasainya hanya atas kekuasaannya, untuk itu manusia tidak boleh memilikinya secara mutlak. Selain kedua ayat di atas masih ada beberapa ayat lagi yang menegaskan kepada kita untuk saling membantu dan tidak mebiarkan harta menumpuk pada satu pihak saja, sehingga kehidupan yang layak dan sejahtera dapat dinikmati oleh semua manusia.

1. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan antara satu sama lain.



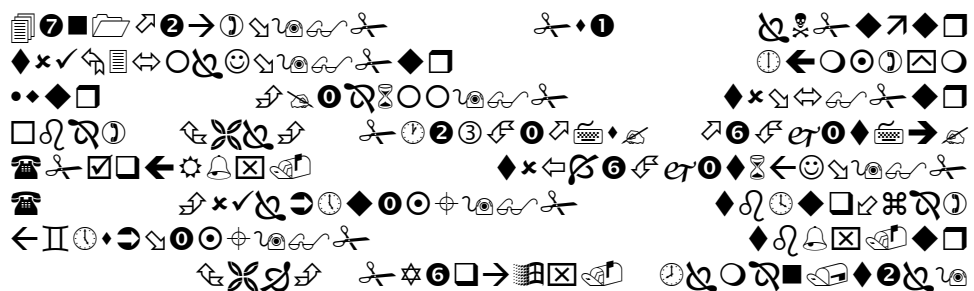
<sup>11</sup> Ibid, h.282



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(Q. S. 5:2)<sup>12</sup>

2. Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 26-27:

Dalam ayat dibawah ini Allah menegaskan kepada kita untuk memperhatikan anak yatim dan orang miskin, sebagaimana yang diungkapkan Al-Qur'an dibawah ini.



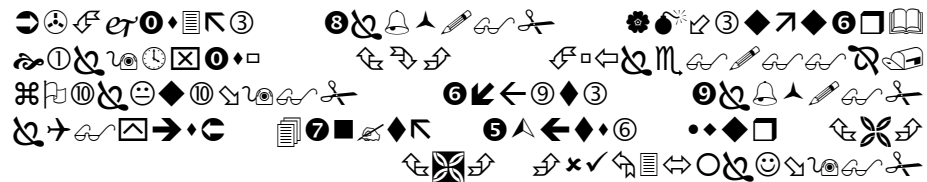
Arinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.(Q. S. 17: 26-27)<sup>13</sup>

3. Al-Qur'an surat Al-ma'un ayat 1-3:

<sup>12</sup> Ibid, h. 85

<sup>13</sup> Ibid, h. 227

Kemudian Allah juga menegaskan hal yang sama pada surat Al-Ma'un, sebagaimana dalam ungkapan Al-qur'an dibawah ini.



Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Q.S. 107:1-3)<sup>14</sup>

#### 4. Hadist Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّاعِي عَلَى الْأُرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ يَسُكُّ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتَرُ وَكَالصَّامِ لَا يَفْطِرُ ( )

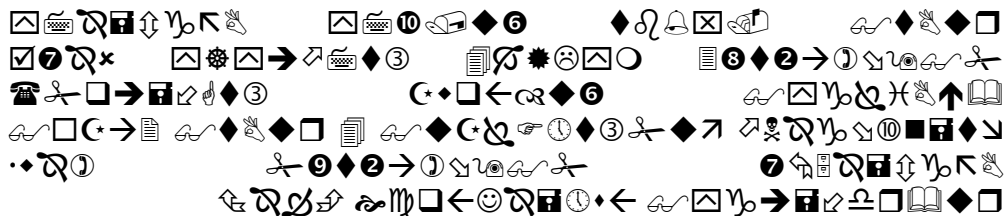
Artinya: Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Maslamah diriwayatkan dari Malik bin Tsaur ibn Zaid dari Abi Alghais dari Abi Hurairah r.a berkata: Berkata Rasulullah SAW “Orang-orang yang mengurus janda dan orang miskin adalah bagaikan orang yang berjuang pada jalan Allah”. Dan kalau tidak salah beliau bersabda pula: “ Dan seperti orang yang sholat malam tidak pernah letih, serta seperti orang yang puasa tidak pernah berbuka”. (H.R Bukhari)<sup>15</sup>

Sementara itu dalam penyaluran dana Program UP2K ini, belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yang mana dana tersebut harus disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yakni masyarakat miskin. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa desa yang tidak menyalurkannya sebagaimana mestinya. Misalnya saja Desa

<sup>14</sup>Ibid, h. 443

<sup>15</sup>Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Isma’il Ibn Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, Jilid 1,2, 3, (Kairah: Darul hisyam, 421-986), h. 710

Sorek Dua, di desa ini dana UP2K hanya digunakan oleh satu orang saja yakni ketua UP2K-nya. Sementara disekelilingnya ada orang yang lebih membutuhkan dan tentunya lebih berhak. Dalam Islam hal ini sama dengan pendzaliman karena mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Jadi hal ini sama sekali tidak sesuai dengan ekonomi Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan ('Adl). Sebagaimana yang temaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 59:



Artinya: Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. (Q.S. 28:59)<sup>16</sup>

Dalam ayat di atas Allah menegaskan bahwa setiap manusia dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat merusak hak manusia lainnya, karena hal yang seperti ini adalah perbuatan dzalim dan orang-orang yang dzalim nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang setimpal.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 313

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memeparkan pembahasan tentang dampak program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan keluarga) di tinjau menurut ekonomi Islam di Kecamatan Pangkalan Kuras. Maka pada bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum memperoleh bantuan penguatan modal program UP2K ini, kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan cukup memprihatinkan. Karena dengan kebutuhan ekonomi yang begitu banyak, dan tanggungan yang juga relative banyak pendapatan yang mereka peroleh tidak begitu memadai, hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja. Sementara banyak kebutuhan lain yang juga perlu dipenuhi. Namun tidak ada usaha yang dapat mereka lakukan karena minimnya modal dan bahkan usaha yang sudah adapun ikut bangkrut karena tidak adanya modal untuk mengembangkan. Namun dengan adanya program UP2K ini masyarakat merasa terbantu, meski dana yang diberikan tidak begitu besar. Akan tetapi mereka tidak perlu memikirkan bunga yang besar tidak seperti meminjam pada instlansi keuangan lainnya. Pendapatan mereka rata-rata mengalami perubahan meski tidak secara signifikan. Namun hal ini meningkatkan kesejahteraan mereka karena dengan bertambahnya

pendapatan, kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan juga akan bertambah besar.

2. Bahwasanya pelaksanaan program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Kecamatan pangkalan Kuras dimulai sejak tahun 2008, akan tetapi karena mengalami beberapa kendala program ini tidak berkembang. Kemudian pada tahun 2009 program ini kembali dijalankan dengan melibatkan masyarakat selaku pengelola. Dana bantuan UP2K ini disalurkan melalui ketua kelompok yang telah dibentuk di setiap desa yang mendapat bantuan, dan dikelola sesuai kesepakatan para anggota kelompok. Baik mengenai usaha yang akan dijalankan, jasa yang diberikan, dan mekanisme pengembalian dana tersebut. Karena pelaksanaan program UP2K ini telah tepat sasaran maka ini menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian tujuan program ini.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap program UP2K dan dampak yang diberikan program tersebut diperbolehkan oleh syari'ah. Karena membantu orang yang lemah dalam bidang ekonomi (miskin) adalah dianjurkan dalam Islam. Dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan merupakan bagian dari keadilan yang menjadi nilai utama dalam islam dan termasuk salah satu prinsip ekonomi Islam. Akan tetapi mengenai pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam, karena bila dilihat dari segi penyaluran dana tersebut masih terdapat ketidakadilan dalam penyaluran dana yang secara jelas bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam.

## **B. Saran**

Dari hasil analisa di atas dan penarikan kesimpulan sebelumnya, penulis akan mengemukakan beberapa saran untuk pengelola dana program UP2K di Kecamatan Pangakalan Kuras sebagai berikut:

1. Karena pelaksanaan UP2K di kecamatan Pangakalan Kuras berkembang dengan baik dan memberikan dampak yang baik pula, alangkah baiknya bila program ini dijalankan terus menerus. Sehingga pemerataan pendapatan dan kesejahteraan dapat dirasakan di desa-desa lain juga.
2. Kemudian meskipun pelaksanaan program UP2K di Kecamatan Pangakalan Kuras cukup berkembang, sepertinya perlu juga dilakukan pengontrolan oleh pihak kecamatan, agar pelaksanaan program tersebut benar-benar terlaksana dengan baik. Dan juga sepertinya pihak pelaksana di Kecamatan masih perlu meberikan pelatihan terhadap pengelola di desa-desa, karena berdasarkan observasi masih ada diantar pengelola yang belum mengerti betul tentang program UP2K ini khususnya dibagian pembuatan laporan bulanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto, 2010. *Teori Makroekonomi Islam “Konsep, Teori, dan Analisis”*, Bandung: Alfabet
- Amin, Yusman, 2008. *Kebijakan, Program dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (online 18 Desember 2010), <http://bappeda.pekanbaru.go.id>
- Anwar, Muhammad Arsjad, dkk, 1995. *Sumberdaya, Teknologi dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Basri, Faisal, 2002 “*Perekonomian Indonesia*”, Jakarta: Erlangga
- Departemen Agama RI, 2006. *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,)
- Dimara, 1995. *Pengaruh Pendapatan Keluarga Terhadap Pendidikan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: Rajawali Press
- Doa, Djamal, 2001. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Nuansa Madani
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin nasution, 2008 “*Investasi Pada Pasar Modal Syari’ah*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Huda, Nurul, dkk, 2008. *Ekonomi Makro Islam “Pendekatan Teoritis”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [http://dinaseptariani.blogspot.com/2010\\_03\\_01\\_archive.html](http://dinaseptariani.blogspot.com/2010_03_01_archive.html), Online 12 November 2010 Jam 14.00
- Kuntjoro Jakti, Dorodjatun, 1994. *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mujahidin, Akhmad, 2007. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Pascasarjana UIN SUSKA Riau
- Mahali, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodi Hasbullah, 2004. “*Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih*” (bagian munakahat dan muamalah)”, Jakarta: Prenada Media



Nawawi, Ismail, 2009. *Pembangunan dan Problem Masyarakat “Kajian Konsep, Model, Aspek Teori Ekonomi dan Sosiologi”*, Surabaya: CV Putra Persada

Rasydi, Suherman, 2009. *Pengantar Teori Ekonomi “Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro”*, edisi revisi, cet-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono, 2004. *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: Rajawali Prees

Sukirno, Sadono, 2002. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press

Sutyastie, S. R. dan P. Tjiptoherijanto, 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Todaro, Michale P, 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi ke-3 Jilid 1, Jakarta: Erlangga.

Tambunan, Tulus T.H, 2003. *Perekonomian di Indonesia (beberapa masalah penting)*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Chapra, Umer, 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Pangkalan Kuras pada Tahun 2010 .....	16
Tabel II.2	Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Pangkalan Kuras pada Tahun 2010 .....	17
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras Menurut Agama dan Kepercayaan .....	18
Tabel II.4	Jumlah Penduduk (KK) Kecamatan Pangkalan Kuras yang Bekerja Berdasarkan Sektor Usaha di Lapangan Pekerjaan Pada Tahun 2010 .....	19
Tabel II.5	Distribusi PDRB Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Berlaku.....	21
Tabel II.6	Jumlah Sarana Perekonomian Dirinci Menurut Jenisnya di Kecamatan Pangkalan Kuras Tahun 2010 .....	23
Tabel II.7	Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Pangkalan Kuras pada Tahun 2009 .....	30
Tabel IV.1	Jenis Usaha yang Ditekuni/Dijalankan.....	60
Tabel IV.2	Lamanya Usaha Ditekuni/Dijalankan.....	61
Tabel IV.3	Jumlah Modal Mereka Sebelum Mendapat Bantuan Program UP2K.....	61
Tabel IV.4	Jumlah Pendapatan Mereka Sebelum Mendapat Bantuan Program UP2K.....	62
Tabel IV.5	Jumlah Modal Mereka Setelah Mendapat Bantuan Program UP2K .....	64
Tabel IV.6	Tanggapan Responden Mengenai Perkembangan Usaha Mereka Setelah Mendapat Bantuan Program UP2K .....	65
Tabel IV.7	Jumlah Pendapatan Mereka Setelah Mendapat Bantuan Program UP2K.....	66
Tabel IV. 8	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Penguatan Modal Usaha dan Jenis Usaha Bagi Pemberdayaan Perempuan dalam Program UP2K Kecamatan Pangkalan Kuras.....	72
Tabel IV.9	Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Miskin Tiap Desa dan Kelurahan yang Menerima Bantuan Program UP2K di Kecamatan Pangkalan Kuras pada Tahun 2009 dan 2010 .....	73
Tabel IV.10	Kelompok Usia Responden Penerima Bantuan .....	75
Tabel IV.11	Agama yang Dianut Responden Penerima Bantuan .....	76
Tabel IV. 12	Tingkat Pendidikan Responden Penerima Bantuan.....	77
Tabel IV. 13	Jumlah Anggota Keluarga yang Masih dalam Tanggung Responden Penerima Bantuan .....	78
Tabel IV.14	Tanggapan Responden Mengenai Program UP2K di Kecamatan Pangkalan Kuras Apakah Sudah Sesuai dengan Syari'at Islam Atau Belum .....	79

## **PANDUAN WAWANCARA**

1. Apa yang dimaksud dengan dana UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) ?
2. Apa tujuan dari dana UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) ?
3. Mulai kapan dana UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dilaksanakan?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan dana UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan keluarga) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ?
5. Pada usaha-usaha apa saja dana tersebut disalurkan ?
6. Bagaimana perkembangan UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?
7. Apa kelebihan dan kelemahan dari program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) ini ?

## ANGKET

Petunjuk pengisian :

Pertanyaan ini hanya semata-mata untuk penelitian ilmiah,

1. Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat ini diharapkan.
2. Identitas dan semua kerahasiaan akan terjaga.
3. Berilah tanda silang pada pertanyaan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu. Dan mohon beri jawaban pada pertanyaan yang harus dijawab dan sesudah saya ucapkan terima kasih.

### **Identitas Responden**

1. Nama :
2. Usia :
3. Agama :
4. Desa/kelurahan :
5. Nama kelompok :
6. Jumlah anggota kelompok :
7. Pendidikan terakhir :

### **Daftar Pertanyaan :**

1. Jenis usaha apa yang Anda tekuni saat ini (dan sebutkan namanya):
  - a. Perdagangan (.....)
  - b. Industry kecil/industry rumah tangga (.....)
  - c. Jasa (.....)
  - d. Pertanian (.....)
2. Berapa lama usaha ini telah berjalan ? Sebutkan ..... bulan ..... tahun
3. Berapakah jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan Saudara ?
  - a. 0 – 2 orang
  - b. 3 – 5 orang
  - c. 6 – 8 orang
  - d. 9 – 10 orang
  - e. > 12 orang
4. Berapa besarnya modal sebelum menerima bantuan penguatan modal dalam program UP2K?  
Sebelum : Rp.....  
Sesudah : Rp.....
5. Berapakah pendapatan yang Anda peroleh sebelum mendapatkan bantuan program UP2K ini, perbulan?
  - a. <Rp. 500.000
  - b. Rp. 500.000 – Rp. 1.499.000
  - c. Rp. 1.500.000 – Rp. 2.499.000
  - d. Rp. 2.500.000 – Rp. 3.499.000
  - e. > Rp. 3.500.000

6. Berapakah pendapatan yang Anda peroleh setelah mendapat bantuan program UP2K ini, perbulan?
  - a. <Rp. 500.000
  - b. Rp. 500.000 – Rp. 1.499.000
  - c. Rp. 1.500.000 – Rp. 2.499.000
  - d. Rp. 2.500.000 – Rp. 3.499.000
  - e. > Rp. 3.500.000
7. Bagaimana usaha yang Anda jalankan setelah mendapatkan modal dari program UP2K ini?
  - a. Berkembang
  - b. Tidak berkembang
  - c. Biasa-biasa saja
8. Apakah menurut Anda program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) ini sudah sesuai dengan Islam?
  - a. Sudah
  - b. Belum
  - c. Tidak Tahu

## BIOGRAFI PENULIS



RITA SAHYUNI HASIBUAN, Lahir di Pujut Kec. Pasir Putih Kabupaten Bengkalis. Anak dari Bapak Samari Hasibuan dan Rosmawati Harahap. Pendidikan SDN Kota Pinang Pada Tahun 1995-1999, kemudian pindah ke SDN 005 Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan dari tahun 1999-2001, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS YPI Al-Qasimiyah Sorek Satu kecamatan pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Pada tahun 2001-2004, dan kemudian melanjutkan MAS YPI Al-Qasimiyah Sorek Satu kecamatan pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Pada tahun 2004-2007. Menyelesaikan studi Program S1 di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2007-2011.

Berkat rahmat Allah SWT, tahun 2011 penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul: “Dampak Program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Bantuan di Tinjau Menurut Ekonomi Islam di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.” dibawah bimbingan Ibu Dra. Sofia Hardani. M.A dan dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian sarjana pada tanggal 21 Juni 2011 dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)